

Tipologi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat Di Wilayah Mahakam Tengah

Fasilitasi dan Advokasi Kesiapan Masyarakat dan Pemerintah Lokal Dalam Kerangka Potensi Proyek REDD+ Di Mahakam Tengah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

Dokumen No. 02/Bioma-CCI/2013



Tipologi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat Di Wilayah Mahakam Tengah

Fasilitasi dan Advokasi Kesiapan Masyarakat dan Pemerintah Lokal
Dalam Kerangka Potensi Proyek REDD+ di Mahakam Tengah Kabupaten
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

Dokumen No.: 02/Bioma-CCI/2013

Tim Penyusun :

Akhmad Wijaya
Pajar Gumelar
Aspian Noor
Junaid Purwanto
Danang Suto Budi

Editor :

Stefi Hakim



KATA PENGANTAR



REDD+ (Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan dan lahan gambut Plus) merupakan mekanisme insentif ekonomi yang diberikan kepada negara berkembang untuk mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan dalam rangka pengurangan emisi karbon. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dengan luas tutupan lahan berhutan lebih dari 1,7 juta ha dan lahan bergambut lebih dari 250 ribu hektar berpotensi besar untuk menerapkan REDD+. Di Tingkat Propinsi, Kukar juga tercatat sebagai emiter terbesar dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Emisinya yang dominan berasal dari penggunaan dan pembukaan lahan mengindikasikan bahwa Kukar berkepentingan menjalankan program REDD+ untuk mengurangi emisi yang cukup besar dengan menurunkan tingkat deforestasi dan degradasi hutan secara signifikan. Kukar juga berkepentingan untuk terlibat dalam kontribusi menekan laju pemanasan global karena termasuk kabupaten yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

REDD+ akan dikembangkan dalam kerangka pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau untuk memastikan bahwa upaya penanganan perubahan iklim dari sektor pemanfaatan dan penggunaan lahan dilakukan sejalan dengan kebijakan dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan di Kukar. Kawasan Mahakam Tengah yang terletak di sekitar danau-danau besar dan sekaligus merupakan kawasan terbesar dari hamparan lahan basah bergambut, oleh Pemerintah Kukar diajukan sebagai salah satu model konservasi untuk kegiatan REDD+. Komitmen tersebut diungkapkan oleh Bupati Kukar dalam pertemuan internasional parapihak (COP) ke 18 di Dubai pada Desember 2012 lalu. Untuk mewujudkan komitmen ini Pemkab Kukar telah melakukan beberapa langkah termasuk mengalokasikan lahan seluas lebih dari 70 ribu hektare di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) di Mahakam Tengah dalam Surat Keputusan Bupati untuk dilindungi.

Dokumen ini merupakan dokumentasi Tipologi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat di Mahakam Tengah yang dilakukan Yayasan Bioma bekerjasama dengan Clinton Foundation dan Pemerintah Kabupaten Kukar dalam rangka inisiasi REDD+ di Kutai Kartanegara beserta capaiannya. Substansi dalam dokumen ini mencakup latar belakang kegiatan, pemilihan lokasi, metode pendekatan, hasil-hasil kegiatan yang, serta tindak lanjut yang diperlukan berkaitan dengan implementasi REDD+ di wilayah Mahakam Tengah. Dokumen laporan akhir ini merupakan salah satu dari serangkaian dokumen lain yang tidak terpisah dari dokumentasi hasil kegiatan yang dilakukan semenjak Juni 2012 hingga April 2013. Dokumen lain yang terkait, Fasilitasi Kesiapan Masyarakat dan Pemerintah Lokal Untuk Inisiatif REDD+ di Mahakam Tengah, Tipologi Biofisik Wilayah Mahakam Tengah, Photo-photo Dokumentasi, Peta-peta Tematik di Penggunaan Lahan di Mahakam Tengah, dan Kumpulan Makalah Kegiatan REDD+ Di Mahakam Tengah.

Atas tersusunnya dokumen laporan akhir ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusinya. Semoga dokumen ini bermanfaat.

Samarinda, Mei 2013

Direktur Eksekutif Yayasan Bioma

Akhmad Wijaya, MP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Metodologi	2
BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI	
2.1. Administrasi	3
2.2. Biogeofisik	4
BAB III. ETNOGRAFI DAN SEJARAH KAWASAN	
3.1. Etnografi	6
3.2. Sejarah Pemukiman Lokal dan Kejadian Penting	13
BAB IV. KONTEK KERENTANAN DAN KECENDERUNGAN	
4.1. Kerentanan dan Masalah	21
4.2. Kecenderungan dan Perubahan	26
BAB V. PIHAK-PIHAK TERLIBAT DAN BERKEPENTINGAN	24
4.1. Identifikasi Stakeholder Individu	21
4.2. Identifikasi Stakeholder Kelompok/Lembaga/Instansi	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Desa-Desa Lokasi Kegiatan	4
Tabel 2. Pengelompokan Permasalahan yang Ditemui di Mahakam Tengah Berdasarkan Gender	22
Tabel 3. Bagan Kecenderungan dan Perubahan di Mahakam Tengah Kutai Kartanegara	30
Tabel 4. Bagan Kecenderungan dan Perubahan di Mahakam Tengah Kutai Kartanegara	30
Tabel 5. Identifikasi Stakeholder Individu Berdasarkan Kepentingan Utama	30
Tabel 6. Pemetaan Stakeholder Kelompok/Individu Berdasarkan Kepentingan Keterlibatan dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi Gambut Mahakam Tengah.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administratif Kabupaten Kutai Kartanegara	3
Gambar 2. Rona Pemukiman Suku Kutai di Desa Muara Siran Kec. Muara Kaman	7
Gambar 3. Rona Pemukiman Desa Enggelam di Tepi Sungai Enggelam di Kec. Muara Wis Kutai Kartanegara	10
Gambar 4. Rona Pemukiman Orang Banjar di Sungai Kedang Rantau Nangka Bonah Desa Tunjungan Kecamatan Muara Kaman	11
Gambar 5. Kapal-kapal Angkutan Transportasi yang Melayani Rute Sungai Mahakam Mayoritas Dimiliki Pengusaha Bugis	13
Gambar 6. Prasasti Yupa dari Abad ke 4 Masehi di Muara Kaman Kukar	14
Gambar 7. Perpindahan Pusat Pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara dari Kutai Lama Ke Tenggarong.....	14
Gambar 8. Pusat Pemerintahan Kolonial Belanda di Tepi Sungai Mahakam Samarinda	16
Gambar 9. Kebakaran Hutan yang Secara Periodik Terjadi di Mahakam Tengah	18
Gambar 10. Sejarah Kebakaran Hutan di daerah Mahakam Tengah	18
Gambar 11. Kegiatan Pembalakan kayu oleh masyarakat di Hutan Rawa Gambut	20
Gambar 12. Segilima asset/capital masyarakat petani dan Nelayan di Mahakam Tengah	22
Gambar 13. Diagram Alur Permasalahan dan Kerentanan di Mahakam Tengah	25
Gambar 14. Bagan Alir Pengambilan Keputusan Pemilihan Sumber Penghidupan Masyarakat Di Mahakam Tengah	27
Gambar 15. Pemukiman dan Rumah Penduduk yang Terendam banjir di Setiap Musim Hujan di Mahakam Tengah	28
Gambar 16. Peta Mobilitas Penduduk Mahakam Tengah di Desa Muara Siran Kecamatan Muara Kaman	29
Gambar 17. Skema Klasifikasi <i>stakeholders</i> Individu dan kelompok	31
Gambar 18. <i>Basecamp</i> Salah Satu Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Sungai Kedang Kepala, Salah Satu Stakeholder Investor yang Memiliki Kepentingan di Wilayah Mahakam Tengah	34
Gambar 19. Kelompok Perempuan sebagai salah satu <i>stakeholders</i> penting yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan di wilayah Mahakam Tengah	35

BAGIAN 1 **PENDAHULUAN****1.1. LATAR BELAKANG**

Kegiatan *Fasilitasi dan Advokasi Kesiapan Masyarakat dan Pemerintah Lokal dalam Kerangka Potensi implementasi Proyek REDD + di Di Mahakam Tengah Kabupaten Kutai Kartanegara* yang dilakukan oleh Yayasan Bioma bekerjasama dengan Clinton Climate Initiative (CCI) dari Clinton Foundation telah dilakukan semenjak Mei 2012 lalu. Meski demikian kegiatan secara efektif baru dimulai pada akhir Juni 2012, dan telah menghasilkan beberapa kegiatan, temuan dan pembelajaran penting hingga akhir April 2013. Kegiatan diperuntukkan untuk mensosialisasikan dan sekaligus menyiapkan masyarakat terkait dengan pengembangan model konservasi gambut di areal Kawasan Budidaya Non Kehutanan. Pertimbangan penting yang melandasi kegiatan ini yaitu pentingnya upaya perlindungan dan pelestarian kawasan bergambut di Mahakam Tengah Kabupaten Kutai Kartanegara yang secara aktual sangat esensial dalam mendukung kehidupan dan keberlanjutan sumber-sumber penghidupan masyarakat lokal di kawasan ini. Atas dasar tersebut, pilihan dukungan terhadap konservasi kawasan bergambut yang diintegrasikan dengan pemberdayaan masyarakat merupakan fokus utama yang dilakukan Clinton Foundation melalui program CCI bekerjasama dengan Yayasan Bioma di wilayah Mahakam Tengah. Dalam mengintegrasikan kedua fokus utama tersebut, CCI dan Bioma melakukan inisiasi model konservasi gambut yang diarahkan pada proyek REDD+.

Sebagai sebuah mekanisme pemberian insentif bagi negara berkembang dalam mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan dan gambut, REDD+ kelihatannya sangat cocok dalam mengintegrasikan tujuan konservasi dan pemberdayaan masyarakat di kawasan gambut Mahakam Tengah. Di kawasan ini, semenjak turun temurun masyarakat memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap lahan gambut sebagai sumber penghidupan dan kehidupan. Sektor perikanan darat, danau dan sungai menjadi mata pencaharian dominan yang dijumpai di desa-desa di wilayah Mahakam Tengah. Oleh karenanya kerusakan dan konversi lahan bergambut di wilayah ini sangat rentan dampaknya terhadap sendi-sendi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat disini.

Berkaitan dengan upaya pengembangan model konservasi di lahan bergambut dalam kawasan budidaya non kehutanan di sekitar Mahakam Tengah ini, CCI dan partnernya Yayasan Bioma dan Pemda Kukar telah melakukan deliniasi beberapa kawasan tersisa seluas lebih kurang 76.000 ha untuk dijadikan model. Kawasan yang tersebar di 5 kecamatan di 30 desa di Kabupaten Kukar ini, tutupan hutannya berupa hutan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter yang sangat esensial dalam mendukung kehidupan dan keberlanjutan keanekaragaman hayati di wilayah ini dan sekitarnya di DAS Mahakam. Sebagian dari lokasi yang direncanakan memang terlanjur terdapat konsesi perkebunan kelapa sawit, namun hingga akhir tahun 2012 lalu, sebagian besar belum melakukan pembukaan lahan. Selain kedalaman gambut yang dalam dan sulit dilakukan konversi, sebagian juga ditolak warga masyarakat. Hasil orientasi dan observasi Yayasan Bioma memperlihatkan bahwa kawasan yang teridentifikasi tersebut, memiliki tutupan hutan yang masih baik dan tempat bagi spesies tumbuhan dan satwa yang dimanfaatkan masyarakat lokal sekitar.

Dalam upaya pengintegrasian aspek sosial kemasyarakatan dengan konservasi sumberdaya hutan sebagai aspek biososial yang saling berkaitan, studi untuk pemahaman sosial yang lebih komprehensif di kawasan yang akan diinisiasi sebagai lokus proyek REDD+ di Mahakam tengah ini perlu dilakukan. Simbiosis yang telah berlangsung lama antara aspek manusia sebagai pengelola, dan lahan bergambut sebagai obyek yang berkesinambungan ini memberi indikasi yang kuat pentingnya sebuah proyek/program konservasi dan pembangunan berkelanjutan berbasis pada pengetahuan dan potensi lokal. Atas dasar tersebut, langkah awal dalam pengenalan situasi aktual

sosial-ekonomi dan budaya masyarakat lokal menjadi kebutuhan yang perlu diketahui dan didokumentasikan.

1.2. TUJUAN

Dokumentasi dari tipologi sosekbud ini secara umum bertujuan untuk memperlihatkan hasil kajian terhadap kondisi aktual sosial-ekonomi dan budaya masyarakat lokal di Kawasan Mahakam Tengah khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan tersebut di atas secara khusus dapat diuraikan sebagai berikut:

- Mengetahui aspek-aspek sosial-ekonomi dan budaya beserta dinamika yang berlangsung pada masyarakat lokal di Mahakam Tengah;
- Mempelajari sejarah kawasan, etnografi lokal dan kejadian-kejadian penting yang terjadi beserta latar belakang dan implikasinya terhadap masyarakat lokal di Mahakam Tengah;
- Mengetahui konteks kerentanan, kecenderungan dan permasalahan yang ditemui dalam kehidupan masyarakat lokal di Mahakam Tengah;
- Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pemberdayaan masyarakat di Mahakam Tengah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan dan pilar dasar bagi Pemda Kukar, Yayasan Bioma dan CCI dalam persiapan dan implementasi program/proyek REDD+ di Mahakam Tengah khususnya, dan wilayah lain di Kalimantan Timur pada umumnya. Hasil-hasil yang diperoleh juga dapat menjadi masukan bagi institusi dan pihak berkepentingan lain dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah Mahakam Tengah khususnya di desa-desa yang menjadi fokus dalam studi ini.

1.3. Ruang Lingkup

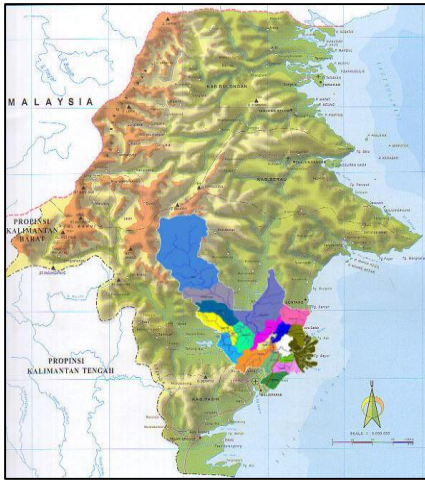
Ruang Lingkup topik dalam dokumen ini adalah aspek-aspek penting terkait sosial-ekonomi dan budaya sebagaimana tujuan penulisan dokumen ini. Fokus lokasi untuk memperoleh substansi diperoleh di beberapa desa di Mahakam Tengah dari hasil kunjungan dan pendekatan studi dengan keterwakilan etnis lokal dominan di Mahakam Tengah yaitu Kutai, Banjar dan Dayak Tunjung.

1.4. METODOLOGI

Kegiatan dilakukan dengan dukungan kombinasi beberapa teknik pendekatan, yaitu: (a) studi dokumentasi atas sumber-sumber sekunder, seperti laporan, dokumentasi dan literatur yang tersedia, (b) observasi dan orientasi lapangan, (c) pertemuan formal dan informal untuk fasilitasi dan diskusi tingkat desa maupun kabupaten, (d) Studi untuk topik-topik tematik melalui wawancara rumah tangga, survey lapangan dan diskusi terfokus, (e) konsultasi dan komparasi atas hasil lapangan melalui diskusi dengan tim.

Penyusunan dokumen laporan kegiatan ini selain sebagai pemenuhan kepentingan administrasi, juga diperuntukkan guna pendokumentasian hasil dan capaian kegiatan, serta bahan dasar untuk arahan tindak lanjut kegiatan di tahap berikutnya terkait persiapan proyek REDD+ di Mahakam Tengah. Sebagai dokumen untuk arahan strategis, dokumen ini akan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan dinamika sosial, politik dan ekonomi (lokal, regional). Oleh karena itu revisi dan penyempurnaan akan terus dilakukan guna kepentingan dokumentasi maupun publikasi yang lebih baik.

2.1. ADMINISTRASI



Kabupaten Kutai Kartanegara secara geografis terletak pada posisi antara $115^{\circ} 26' 8,05''$ Bujur Timur sampai dengan $117^{\circ} 37' 43,004''$ Bujur Timur dan antara $1^{\circ} 27' 13,7''$ Lintang Utara sampai dengan $1^{\circ} 8' 19,82''$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah $27.263,10 \text{ km}^2$ atau $2.726.310 \text{ Ha}$ (12,89% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur), mempunyai batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.
- Sebelah Timur dengan Selat Makassar.
- Sebelah Selatan dengan Kab. Pasir dan Kota Balikpapan.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Kutai Barat.

Sebelum terpecah menjadi beberapa kabupaten/kota definitif sesuai dengan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, Kabupaten Kukar hanya dikenal dengan sebutan Kabupaten Kutai saja. Saat itu Kabupaten Kutai mempunyai luas $95.046,00 \text{ km}^2$ dengan 38 Kecamatan dan 482 desa/kelurahan. Kabupaten Kutai ini sendiri seyogyanya merupakan kelanjutan dari Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, sebuah kerajaan tertua di Indonesia dari afiliasi Kerajaan Hindu Kutai Martadipura di Muara Kaman dengan Kerajaan Kutai Kartanegara di Tenggarong yang telah memeluk Islam.



Gambar 1. Peta Administratif Kabupaten Kutai Kartanegara

Setelah Republik Indonesia berdiri, pada tahun 1947 Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura dengan status *Daerah Swapraja Kutai* masuk ke dalam Federasi Kalimantan Timur bersama-sama daerah Kesultanan lainnya seperti Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur dan Pasir. Kemudian pada 27 Desember 1949 masuk dalam Republik Indonesia Serikat. Ketika Negara Indonesia Timur yang berpusat di Makasar didirikan, Kesultanan Kutai sempat terpecah dalam dualisme yang ingin bergabung dalam negara boneka NIT serta RIS. Namun pada saat RIS dibubarkan pada 1955, Kesultanan Kutai yang masuk dalam federasi Kalimantan Timur berganti menjadi Propinsi Kalimantan Timur.

Paska pemekaran tahun 1999, istilah *Kabupaten Kutai Induk* sering digunakan untuk membedakan antara Kabupaten Kutai hasil pemekaran dengan Kabupaten Kutai yang lama. Pada Musyawarah Nasional yang pertama APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) yang diadakan di Tenggarong pada tahun 2000, Presiden RI Abdurrahman Wahid yang membuka Munas tersebut mengusulkan agar Kabupaten Kutai hasil pemekaran menggunakan nama **Kabupaten Kutai Kartanegara**, mengingat kota Tenggarong juga merupakan ibukota dari Kesultanan Kutai Kartanegara. Tanggal 23 Maret 2002, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menetapkan penggunaan nama **Kabupaten Kutai Kartanegara** melalui Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2002 tentang "Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Setelah pemekaran wilayah, maka luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi 27.263,10 km² dengan wilayah administratif meliputi sebagian wilayah Kabupaten Kutai sebelumnya yang terdiri dari 18 Kecamatan dengan 194 desa/kelurahan seperti disajikan pada tabel 1. berikut.

Tabel 1 . Wilayah Administratif Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	KECAMATAN	Jumlah Desa	LUAS	
			(km ²)	(%)
1.	Samboja	11	1.045,90	3,46
2.	Muara Jawa	9	754,50	3,89
3.	Sanga-Sanga	7	233,40	2,40
4.	Anggana	8	1.798,80	6,69
5.	Muara Badak	8	939,09	3,49
6.	Marang Kayu	12	1.165,71	1,48
7.	Tenggarong Seberang	11	437,00	3,20
8.	Loa Janan	16	644,20	4,26
9.	Loa Kulu	8	1.045,70	4,85
10.	Tenggarong	8	398,10	7,16
11.	Sebulu	16	859,50	12,69
12.	Muara Kaman	18	3.410,10	28,89
13.	Kota Bangun	18	1.143,74	3,78
14.	Muara Muntai	7	928,60	2,81
15.	Muara Wis	5	1.108,16	0,87
16.	Kenohan	16	1.302,20	1,63
17.	Kembang Janggut	10	1.923,90	4,34
18.	Tabang	7	7.764,50	4,12
Jumlah		194	27.263,10	100,00

Sumber : Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2011

Mahakam Tengah yang menjadi fokus utama dalam kegiatan inisiatif REDD+ di Propinsi Kaltim ini, merupakan sebutan untuk wilayah di bagian tengah Sungai Mahakam yang meliputi daerah sekitar tiga danau besar yaitu Danau Jempang (sekitar 15.000 ha), Danau Melintang (11.000 ha) dan Danau Semayang (13.000 ha). Secara Geografis terletak antara 116 ° - 117 ° E, dan 0 ° 00 ' - 0 ° 30' S dan mencakup luasan sekitar sekitar 400.000 ha. Secara administratif Mahakam Tengah berada di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Kutai Barat. Lahan bergambut terbesar (lebih dari 60%) berada di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kecamatan Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Muara Kaman, dan Kenohan. Selebihnya berada di Kabupaten Kutai Barat di Kecamatan Jempang, Penyinggahan dan Muara Pahu, serta Kabupaten Kutai Timur di Kecamatan Muara Ancalong dan Muara Bengkal.

Secara ekoregional, kawasan Mahakam Tengah berada pada ekoregion Sunda dan merupakan bagian dari Sungai Mahakam, yang merupakan salah satu sistem sungai utama dari Kalimantan. Selain tiga danau besar (Danau Jempang, Melintang dan Semayang), terdapat danau lain yang lebih kecil yaitu Danau Siran, Danau Liang Buaya, Danau Loa Kang, Danau Wis, Danau Padam Api, Danau Jintan, Danau Belempung, Danau Berambai dan Danau Mensangat. Semenjak ratusan tahun yang lalu kawasan Mahakam Tengah berperan penting sebagai daerah resapan dan pengendali daerah aliran sungai Mahakam dari limpasan air di wilayah hulu dan bagian hilir di Tenggarong dan Samarinda. Kawasan ini juga berperan penting secara sosial ekonomi sebagai wilayah tangkapan berbagai jenis ikan air tawar yang menjadi sumber penghidupan masyarakat asli Kutai, Dayak Tunjung dan pendatang Banjar di desa-desa sekitar Mahakam Tengah.

2.2. BIOGEOFISIK

Wilayah Mahakam Tengah sebagian besar kawasannya berupa lahan basah rawa riparian dan rawa bergambut di sekitar danau-danau besar dari anak-anak sungai terbesar Sungai Mahakam yang bermuara di kawasan ini. Sungai tersebut antara lain Sungai Kedang Pahu, Sungai Belayan, Sungai

Kelinjau dan Sungai Kedang Rantau. Danau-danau di kawasan Mahakam Tengah mengalami fluktuasi volume yang absolut antara musim kering (kemarau) dengan musim basah (hujan). Di musim kemarau, danau-danau akan mengering dan di musim hujan meluap menggenangi sebagian besar daratan hingga mencapai luasan sampai lebih dari 60.000 ha. Kedalaman maksimum danau-danau di wilayah Mahakam Tengah adalah sekitar 6-7m.

Vegetasi yang umum dijumpai di kawasan Mahakam Tengah sekitar danau didominasi oleh gulma mengambang (terutama *Salvinia* sp dan *Eichhornia crassipes.*, *Mimosa pigra* dan *Polygonum barbatum*). Di lahan bergambut vegetasi yang dominan yaitu *Kahoi* (*Shorea belangeran*), *Pelai* (*Alstonia* sp), *Gelam* (*Melaleuca galam*), *Renghas* (*Gluta* sp), *Terentang* (*Dillenia* sp), *Ketiau*, *Beluma*, dan *Gemor*. Hutan rawa riparian dan gambut yang luas sebelumnya pernah rusak oleh kebakaran hutan pada tahun 1982/1983 dan terulang kembali tahun 1997/1998. Daerah rawa danau di kelilingi oleh hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut dan hutan hujan dataran rendah dipterocarp. Pada tingkat lanskap, kawasan Mahakam Tengah memiliki peran resapan dan penyangga penting untuk pengaturan alami dari pemukiman di bagian hilir Mahakam.

Secara ekologi, danau dan daerah lahan basah di Mahakam Tengah adalah salah satu daerah yang paling penting di Kalimantan Timur. Studi-studi yang telah dilakukan di kawasan ini mencatat bahwa kawasan Mahakam Tengah merupakan tempat regenerasi penting dan sekaligus habitat dari migrasi untuk total lebih kurang 90 spesies burung, termasuk populasi penting dari berbagai jenis burung Kuntul dan Bangau. Keanekaragaman jenis ikan, dan adanya mamalia yang terancam punah seperti Pesut Mahakam, Orang Utan, Bekantan, Buaya Siam, dan jenis Lutung menunjukkan pentingnya nilai pelestarian dan perlindungan di daerah ini. Pelestarian lahan basah dan danau di Mahakam Tengah tidak hanya memiliki kepentingan terhadap keanekaragaman hayati nasional, tetapi juga internasional dalam hal migrasi dan berkembang biak spesies burung di daerah ini.

Kawasan Mahakam Tengah juga memiliki kepentingan ekonomi nasional dengan tangkapan tahunan ikan air tawar yang mencapai 25.000-5.000 metrik ton sejak tahun 1970 . Saat ini, daerah ini adalah pemasok tunggal terbesar ikan air tawar kering. Namun, sampai sekarang tidak ada status perlindungan resmi diberikan kepada kawasan Mahakam Tengah dalam konteks perikanan. Danau Semayang memang pernah diusulkan sebagai Taman Nasional pada awal tahun 1980 oleh Direktorat Jenderal Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Republik Indonesia, namun pada akhirnya hanya kawasan 'pulau' di sepanjang Muara Ancalong dan Muara Kaman yang dijadikan sebagai kawasan reservat yang diberi nama Cagar Alam Sedulang Muara Kaman.

Sehubungan dengan keberadaan ikan yang melimpah di daerah ini, selain sistem penangkapan yang terus berkembang dengan mulai menggunakan peralatan yang tidak lestari, juga secara fisik perairan di daerah ini mengalami tekanan sedimentasi yang hebat akibat kegiatan penebangan di wilayah hulu. Dua daerah konservasi perikanan telah diajukan oleh Dinas Perikanan yaitu yang pertama di dekat Kota Bangun (Danau Loa Kang) seluas lebih kurang 930 ha, dan yang kedua di dekat Muara Muntai (Batu Bumbun) seluas lebih kurang 450 ha. Kedua kawasan reservat perikanan tersebut masih utuh dan konon telah dibentuk semenjak masa Kesultanan Kutai yang sudah ada sekitar 500 tahun yang lalu dan telah dikelola di bawah Kabupaten Kutai sejak tahun 1978 melalui Perda Kabupaten Kutai No 18 Tahun 1978.

BAGIAN 3

ETNOGRAFI DAN SEJARAH KAWASAN

3.1. ETNOGRAFI

Kawasan Mahakam Tengah, dihuni oleh sejumlah komunitas yang telah mendiami pemukiman di desa-desa tradisional di wilayah ini. Masyarakat asli yang disebutkan sebagai penduduk asli dari kawasan ini adalah orang Kutai dan orang Dayak Tunjung dan Benuaq. Orang Kutai dan Dayak Tunjung dapat ditemui di beberapa desa di Mahakam tengah yang masuk wilayah administratif Kutai Kartanegara dan Kutai Barat. Sedangkan orang Benuaq di Mahakam Tengah hanya dijumpai wilayah administratif Kutai Barat di Kecamatan Jempang. Sementara wilayah Mahakam tengah yang masuk wilayah administratif Kutai Timur, penduduk aslinya hanya orang Kutai.

Selain orang Kutai dan Dayak, pemukim lain yang dikategorikan pendatang dan dominan di beberapa desa di Mahakam Tengah yaitu orang Banjar dan Bugis. Di beberapa desa seperti halnya di Muara Muntai dan Muara Kaman, beberapa keluarga orang Banjar bahkan telah bermukim semenjak ratusan tahun yang lalu. Mereka pun banyak yang sudah beranak pinak dan tidak mengetahui lagi kampung asal leluhur mereka di Kalimantan Selatan. Mereka sering disebut atau menyebutkan diri sebagai Banjar Kutai yang artinya orang Banjar yang telah menjadi Kutai, atau Kutai Banjar yang berarti perkampungan di Kutai yang berdialek Banjar. Untuk mempermudah pemahaman terhadap kelompok-kelompok suku yang mendiami desa-desa di wilayah Mahakam Tengah, pada bagian dibawah ini akan diuraikan konteks etnografi singkat dari suku-suku tersebut.

3.1.1. Suku Kutai

Orang Kutai umumnya tinggal di bagian tengah Sungai Mahakam. Mereka adalah penduduk asli yang telah menempati bagian tengah Sunagi Mahakam hingga tersebar ke beberapa bagian hulu dan anak-anak sungai lain di Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kertanegara, dan Kutai Barat. Banyak tulisan menyebutkan bahwa dahulu sebenarnya orang Kutai adalah juga kelompok masyarakat Dayak. Kerabat paling dekat adalah Dayak Tunjung dan Benuaq. Namun semenjak mereka memeluk Islam identitas ke-Dayak-an mereka hilang dan lebur menjadi kelompok yang disebut Kutai. Orang Dayak sering menyebutkan orang Kutai yang Islam sebagai orang Haloq atau Alo' untuk membedakan dengan orang Dayak yang belum memeluk Islam.

Hubungan Tunjung dan Kutai sudah terdapat dalam tulisan yang tertua dalam kitab Negara Kertagama dimana nama Kutai untuk pertama kali didapatkan tertulis dengan sebutan Tunjung Kutai yang tidak dipisahkan. Dalam mitologi orang Tunjung sendiri, mereka meyakini bahwa antara Tunjung dan Kutai juga Dayak Benuaq merupakan trilogi suku yang masih satu keturunan yang sudah ada semenjak Kerajaan Hindu Mulawarman. Dalam masa awal kemerdekaan, sejarawan M. Yamin menulis hubungan Kutai dan Tunjung ini dengan sebutan Tanjung Kutai.

Nama Kutai sendiri sebenarnya diidentikkan dengan nama kerajaan yang didalamnya adalah unsur-unsur masyarakat Dayak. Kerajaan tersebut yaitu Kutai ing Martadipura yang berpusat di Muara Kaman, dan Kerajaan Kutai Kartanegara yang berpusat di Jaitan layar (Kutai Lama) dan berpindah ke Tangga Arung (Tenggarong). Mengenai asal usul nama Kutai, terdapat beberapa versi. Pendapat pertama menyebutkan bahwa nama Kutai berasal dari bahasa Hindu India yaitu *Qotai* yang berarti hutan lebat. Pendapat kedua menyebut kalau nama Kutai berasal dari istilah China yaitu *Kho Thai* yang berarti kerajaan besar atau daerah yang makmur. Orang Jepang sendiri pada masa pendudukan Jepang menyebut orang Kutai dengan sebutan Koti.

Menurut sejarahnya, orang Kutai berasal dari keturunan ras Proto Melayu yang sampai ke Kalimantan Timur sekitar 3.000 tahun lalu. Dalam perkembangannya mereka telah mengalami banyak pengaruh dan peradaban dari luar seperti Hindu, Budha, Islam dan Melayu. Pengaruh Hindu disinyalir langsung dari India tanpa melalui Jawa sebagaimana banyak dikemukakan para ahli. Hal

ini dapat dilihat dari nama dan temuan barang kuno dan bahasa yang lebih banyak kemiripan dengan aslinya di India. Demikian juga kebudayaan dan kepercayaan tradisional kuno Suku Dayak Tunjung dan Benuaq yang masih kerabat dengan Suku Kutai, banyak ditemui ritus dan nama-nama yang mirip dengan kepercayaan Hindu.

Berbeda dengan pengaruh Hindu, pengaruh Budha di kalangan masyarakat Kutai diperkirakan justeru melalui Jawa. Kehadirannya dimulai setelah kejayaan kerajaan-kerajaan beraliran Budha di Jawa mulai berkembang pesat. Sedangkan pengaruh Islam dimulai semenjak abad 14 melalui pedagang dari Makasar dan Malaka. Oleh karenanya kebudayaan Islam Kutai selanjutnya lebih menyerupai Islam Melayu. Tidak sedikit para ahli yang mengelompokkan suku Kutai sebagai bagian ras Melayu. Pengelompokan Kutai sebagai bagian ras melayu sangat beralasan mengingat bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Melayu dengan berbagai dialek dan logat sesuai sub suku (puak).

Berdasarkan dialek logat bahasa dan ciri khusus lainnya, terdapat beberapa kelompok Suku Kutai ini. Misalnya, (1) Kutai Tenggarong di daerah sekitar Bengalon, Sangkulirang, Kutai Lama, sekitar Tenggarong, Muara Kaman dan Muara Ancalong; (2) Kutai Pantun di sekitar Sangatta, Muara Wahau, Telen, Muara Bengkal dan Menamang; (3) Kutai Pahu di sekitar Muara Pahu, Melak dan Long Iram, (4) Kutai Bangun, disekitar Kota Bangun, Kahala dan Kembang Janggut, Muara Muntai, Bongan.

Pada masa lampau pembagian puak suku Kutai lebih didasarkan pada lokasi tinggal yang juga mengidentitaskan asal keturunan mereka. Pengelompokannya yaitu : (1) Puak pantun yang mendiami daerah sekitar Muara Ancalong, Muara Kaman, (2) Puak Punang mendiami daerah sekitar Kota Bangun dan Muara Muntai, (3) Puak Tulus Dijangkat mendiami di sekitar Muara Pahu, Melak dan Barong Tongkok dan Puak Melanti yang mendiami daerah Tenggarong, Kutai Lama hingga Sangatta dan Sangkulirang.

Mata pencaharian orang Kutai terutama yang tinggal bermukim di sekitar kawasan hutan umumnya bertani, membuat sirap dan mengumpulkan hasil hutan. Di daerah Mahakam Tengah di sekitar danau-danau sebagian besar menjadi nelayan sungai dan danau. Jika musim kemarau mereka akan membakar belukar rawa dan danau yang mengering untuk kegiatan bercocok tanam. Sebagian juga membakar hutan rawa gambut yang tersisa untuk membuka akses terhadap lokasi danau baru yang dianggap banyak terdapat ikan. Selain berladang dan menjadi nelayan sungai dan danau, beberapa keluarga juga masih melakukan perburuan secara tradisional, dan sebagian lagi telah beralih bekerja di sektor perikanan secara komersial. Pekerjaan membuat sirap (atap rumah dari kayu Ulin dan kayu keras lainnya) merupakan keahlian sekaligus ciri kas orang Kutai. Akibat kekurangan bahan baku, pekerjaan ini banyak yang ditinggalkan dan beralih ke industri kayu komersil seperti kayu '*belambangan*', kayu '*bandalan*' untuk bahan baku chip dan fiber, dan kayu ulin untuk *flooring*.



Gambar 2. Rona Pemukiman Suku Kutai di Desa Muara Siran Kec. Muara Kaman

Di Mahakam Tengah, orang Kutai cukup dominan di beberapa desa. Mereka membaaur bersama pendatang Suku Banjar yang juga dominan di beberapa desa. Hubungan Kutai dan Banjar yang sudah berlangsung cukup lama semenjak masa kesultanan menyebabkan terjadi pembauran yang kental. Sehingga terkadang di beberapa desa sulit mengidentitaskan jatidiri tentang keaslian kedua suku apakah orang Kutai campur Banjar atau orang Banjar yang berdialek Kutai. Perbedaan biasanya hanya ditujukan kepada kelompok-kelompok pendatang orang Banjar yang datang belakangan paska kemerdekaan RI.

3.1.2. Suku Dayak Tunjung

Pemukiman Suku Dayak Tunjung di Kalimantan Timur dijumpai di daerah bagian tengah hingga sedikit ke arah hulu Sungai Mahakam. Mereka mendiami desa-desa tradisional di beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, komunitas Dayak Tunjung dapat dijumpai pemukimannya di tepi Sungai Belayan di Kecamatan Kembang Janggut, Sungai Berambai di Kecamatan Kenohan, Sungai Enggelam di Kecamatan Muara Wis, dan Sungai Jembayan Kecamatan Loa Kulu. Pemukiman komunitas Dayak Tunjung terbesar dijumpai di beberapa desa di Kabupaten Kutai Barat. Mereka dominan di Kecamatan Linggang Bigung, Kecamatan Barong Tongkok, Kecamatan Sekolaq dan Kecamatan Mook Manor Bulatn. Penyebaran lainnya di Kutai Barat dapat dijumpai di beberapa desa di Kecamatan Muara Pahu, Kecamatan Melak dan Long Iram.

Pemukiman komunitas Dayak Tunjung umumnya berada atau berdampingan dengan komunitas Kutai dan Dayak Benuaq. Dahulu ketiga suku tersebut memang memiliki hubungan kekerabatan yang erat dan saling mempengaruhi. Banyak kalangan menyebutkan bahwa sebagian besar orang Kutai seperti halnya di daerah Bongan, Muara Pahu dan Melak, konon dulunya termasuk bagian dari komunitas Dayak Tunjung dan Benuaq. Namun semenjak mereka memeluk Islam, sebutan orang Dayak banyak dihilangkan dan melebur diri sebagai Orang Kutai atau hanya menyebut sebagai orang *Pahuq* tanpa kata 'Dayak'. Oleh karenanya di kalangan orang Benuaq, Tunjung dan Bentian, seringkali menyebut orang muslim sebagai *orang pahuq*, sebaliknya mereka yang non muslim tetap disebut sebagai *dayak*. Ketika Raja Kutai memeluk Islam dan menjadikan Islam sebagai agama resmi di Kerajaan Kutai, dominasi komunitas Kutai dengan kebudayaan Melayu-Muslim memang semakin berkembang di Kerajaan Kutai. Banyak komunitas Dayak seperti utamanya Dayak Tunjung dan Benuaq, konversi menjadi muslim. Ketika mereka telah memeluk Islam dan menjadi muslim, mereka umumnya lebih menyukai sebutan jati diri dan komunitasnya sebagai Orang Kutai dibandingkan sebagai 'dayak'. Menjadi Muslim berarti menjadi orang Kutai.

Jika merunut sejarahnya, baik kalangan orang Kutai maupun Orang Benuaq dan Tunjung, mereka saling mengakui masih serumpun dari leluhur yang sama. Meski terdapat banyak varian, dalam mitologi ketiga suku disepakati bahwa leluhur ketiganya berasal dari garis keturunan Tulus Aji Jangkat. Legenda Tulus Aji Jangkat sebagai anak yang turun dari langit dan dibesarkan oleh *Sengkereaq* melekat erat dalam cerita asal usul komunitas Kutai, Tunjung dan Benuaq.

Dalam naskah kuno Kerajaan Majapahit, nama Kutai pertama kali muncul dalam kitab *Negarakertagama* ditulis dengan sebutan Tunjung Kutai. Makna kata itu konon boleh jadi karena nama Tunjung adalah nama seluruh suku yang mendiami daerah Kutai. Ketika sebagian besar dari komunitas Tunjung itu sendiri telah memeluk Islam, mereka kemudian menjadi minoritas dan memilih mengikuti adat komunitas Dayak Benuaq yang memang masih dominan tidak memeluk Islam. Di kemudian hari, karena alasan-alasan persamaan kebudayaan dengan orang Benuaq dan Bentian yang memang termasuk kelompok Suku Dayak Lawangan dari Kalimantan Tengah yang masih memeluk Kaharingan, orang Tunjung banyak dikelompokkan sebagai bagian dari Group Dayak Lawangan.

Di kalangan orang Dayak Tunjung sendiri, mereka meyakini bahwa adat dan kebudayaan yang mereka miliki saat ini bukanlah dari komunitas mereka. Tetapi dari percampuran kebudayaan Dayak Benuaq dari kelompok Dayak Lawangan Kalimantan Tengah. Di bagian Ulu Mahakam seperti halnya orang Tunjung Linggang dan Tunjung Tengah, kebudayaan mereka bahkan telah bercampur dengan kebudayaan Dayak Bahau dari Apokayan. Dalam beberapa ritus dan upacara adat yang dilakukan orang Tunjung, acapkali mempergunakan bahasa kuno Dayak Benuaq atau Bahau. Ritus dari bahasa Dayak Benuaq kuno banyak dipergunakan oleh komunitas Dayak Tunjung Tengah dan Londong, sedangkan ritus bahasa Dayak Bahau kuno banyak dipergunakan oleh komunitas Dayak

Tunjung Linggang (*Rentenukng*). Namun yang pasti, baik orang Tunjung, Benuaq dan Bantian menyebutkan bahwa sebutan Tuhan dalam kepercayaan tradisional mereka yaitu *Latala* atau *Lahatala* adalah sebutan dari *Allah ta 'Ala*. Hal ini menunjukkan bahwa dahulu mereka telah dipekenalkan kepada ajaran tauhid Islam sebagai kepercayaan tunggal di Kerajaan Kutai.

Mengenai sebutan 'Tunjung' sendiri, secara internal orang-orang Dayak Tunjung menyebutkan jati diri mereka dengan sebutan orang *toonyoi*. Sebutan *Tunjung* konon berasal dari sebutan orang-orang di luar mereka khususnya orang Kutai untuk menyebutkan sekelompok orang yang bermukim di suatu tempat yang disebut Dataran Tinggi Tunjung. Secara administratif Dataran Tinggi Tunjung saat ini meliputi wilayah Kecamatan Sekolaq, Barong Tongkok dan Linggang Bigung di Kutai Barat.

Terminologi lain dari asal kata Tunjung adalah berasal dari bahasa kelompok Dayak Tunjung *Rentenukng*, yaitu dari kata kerja '*tuncukng*' yang bermakna mudik ke hulu. Sangat dimungkinkan istilah tersebut berubah menjadi Tunjung karena diucapkan oleh orang Kutai di wilayah hilir untuk menyebutkan sekelompok orang yang tinggal di daerah udik atau hulu sungai. Di kalangan orang Dayak Tunjung sendiri, mereka seringkali menyebutkan jati diri mereka sebagai *orang tonyooy*. Sebutan orang *tonyooy* sebagai sebutan internal bagi orang Tunjung berasal dari kata 'tonoy' yang berarti roh pemberi restu dalam upacara adat '*besaraq*' dalam kepercayaan Kaharingan. *Tonyooy* juga berarti adalah roh yang menjaga keselamatan keluarga dan masyarakat desa, serta hal-hal yang memberi keberuntungan pada umat manusia. Dalam terminologi ini, sebutan *tonyooy* memiliki makna sebagai pembeda untuk menyebutkan jati diri suatu komunitas yang masih memiliki keyakinan pada roh leluhur yaitu Dayak Tunjung, dengan keyakinan komunitas muslim Kutai (orang *haloq* atau *pahuq*) yang telah memeluk Islam.

Berdasarkan letak geografis, persamaan bahasa dan historinya, komunitas Dayak Tunjung terbagi lagi dalam beberapa kelompok atau sub suku. Sub suku tersebut antara lain Tunjung Asli, Tunjung Tengah, Tunjung Berambai, Tunjung Londong, Tunjung Bahau, dan Tunjung Linggang (*Rentenukng*). Ada pula yang mengelompokkan sub sukunya dalam beberapa kelompok yaitu:

- Tunjung Bubut, mereka mendiami daerah Asa, Juhan Asa, baloq Asa, Pepas Asa, Juaq Asa, Muara Asa, Ongko Asa, Ombau Asa, Ngenyan Asa, Gemuhan Asa, Kelumpang dan sekitarnya
- Tunjung Asli, Mendiami daerah Geleo (baru dan Lama);
- Tunjung Bahau (Tunjung Sekolaq), Mendiami Barong Tongkok, Sekolaq Darat, Sekolaq Muliaq, Sekolaq Oday, Sekolaq Joleq dan sekitarnya;
- Tunjung Hilir, mendiami wilayah Empas, Empakuq, Bunyut, Mendung, Kuangan dan sekitarnya.
- Tunjung *Londokng*, mendiami daerah seberang Mahakam yaitu Gemuruh, Sakaq Lotoq, Sakaq Tada, Gadur, dan sekitarnya.
- Tunjung Linggang (Tunjung *Rentenukng*), mendiami didaerah dataran Linggang seperti Linggang Bigung, Linggang Melapeh, Linggang Amer, Linggang Mapan, Linggang Kebut, dalam pembangunan di wilayah Mahakam Tengah

- Linggang Marimun, Muara Leban, Muara Mujan, Tering, Jelemuq, Lakan Bilem, Into Lingau, Muara Batuq dan wilayah sekitarnya.
- Tunjung Berambai (Tunjung Hilir), mendiami Wilayah hilir sungai Mahakam seperti Muara Pahu, Abit, Selais, Muara Jawaq, Kota Bangun, Enggelam, Lamin Telihan, Kembang Janggut, Kelekat, dan Pulau Pinang

Di Mahakam Tengah sekitar wilayah rawa bergambut di Kutai Kartanegara, komunitas Dayak Tunjung yang dominan yaitu dari sub Dayak Tunjung Berambai atau Tunjung Hilir. Pemukiman asli mereka ditemui di Sungai Enggelam Kecamatan Muara Wis di Ketibe dan Emboyong Desa Enggelam, serta di Sungai Berambai di Malong Desa Lamin Telihan, Desa Lamin Pulut dan Desa Teluk Bingka Kecamatan Kahala. Dari kedua sungai tersebut mereka menyebar ke desa-desa di sepanjang Sungai Belayan seperti Desa Pulau Pinang, Bukit Layang dan Kelekat di Kecamatan Kembang Janggut.



Gambar 3. Rona Pemukiman Desa Enggelam di tepi Sungai Enggelam di Kecamatan Muara Wis Kukar

Komunitas Dayak Tunjung Berambai memiliki dialek tersendiri dibandingkan komunitas Tunjung lainnya. Ciri khas lain yang menonjol yaitu selain mata pencaharian berladang seperti halnya kebanyakan orang Dayak, mereka juga memiliki keahlian menjadi nelayan sungai dan danau. Pemukiman orang Tunjung Berambai yang terletak di sekitar lahan bergambut menjadikan mereka memiliki tradisi dalam penangkapan ikan di sungai, rawa dan danau

3.1.3. Suku Banjar

Orang Banjar merupakan penduduk asli mayoritas dan dominan di Propinsi Kalimantan Selatan. Seringkali orang Banjar diidentikan sebagai bagian dari rumpun bangsa Melayu dari kelompok Melayu Muda. Padahal jika ditelusuri dalam sejumlah sejarah dan sosial masyarakat Banjar, kelompok suku yang diidentitaskan sebagai 'Orang Banjar' tersebut merupakan bentukan dari unsur Melayu, ditambah dengan unsur Dayak Meratus (Bukit), Dusun, Ngaju dan Maanyan yang umumnya tinggal di pesisir dan telah memeluk Islam. Kendati Banjar masuk dalam kebudayaan Melayu, tetapi unsur kebudayaan Jawa sangat kuat, sehingga banyak yang menyebut Orang Banjar sebagai "Melayu yang Jawa' atau 'Jawa yang Melayu'.

Penduduk asli orang Dayak seringkali menyebut orang Banjar sebagai Oloh Masih (Orang Melayu), atau Orang Dagang (sebutan Orang Bukit terhadap Orang Banjar Hulu dan pendatang), atau orang Alo atau Haloq (sebutan Orang Dayak di Mahakam terhadap orang pesisir yang memeluk Islam). Istilah 'Banjar' merujuk pada terminologi bahasa Jawa Kuno yang berarti kelompok atau kampung. Mula-mula sebutan kata 'Banjar' dipergunakan untuk menyebutkan pemisahan kelompok dari pemukim asal Jawa dan Orang Melayu yang berjasa terhadap Pangeran Samudaera (Sultan Suriansyah) sebagai konsesi kemenangannya melawan pamannnya, Pangeran Tumenggung. Namun kemudian berkembang sebagai istilah yang dipergunakan untuk menyebutkan pemisahan orang Dayak yang telah berkampung dan memeluk Islam dengan orang Dayak yang tidak/belum berkampung dan tidak memeluk Islam.

Di Kalimantan Timur, eksistensi Orang Banjar sudah terjalin semenjak masa pemerintahan Kesultanan Banjar dipimpin Sultan Suriansyah (1595-1620). Dengan bala bantuan dari Kerajaan Demak, Kesultanan Banjar terus melebarkan pengaruhnya ke Paser, Kutai, dan Berau. Perjanjian yang ditanda tangani antara Pieter Pietarsz (utusan VOC) dengan Raja Kutai Kartanegara dalam tahun 1635 memuat antara lain bahwa perdagangan bebas hanya dibolehkan antara Kerajaan Kutai dengan Orang-orang Banjar dan Belanda saja. Semenjak itulah pedagang-pedagang asal Banjar mulai mendominasi sebelum kedatangan migrasi orang Bugis pada tahun 1638-1654 dan jatuhnya Makasar ke tangan Belanda tahun 1667.

Kekalahan pangeran Antasari dan jatuhnya Kesultanan Banjar ke tangan Belanda dalam perang Banjar yang berlangsung dari tahun 1859-1863, menyebabkan para pengikut Pangeran Antasari dan bangsawan Kesultanan Banjar lain yang tidak mau tunduk dengan Belanda memilih pergi dan menetap di daerah lain termasuk Kesultanan Kutai, Paser dan Berau. Selain melalui pesisir pantai, mereka juga menembus jalan darat dan bermukim di sekitar danau-danau besar di bagian tengah Sungai Mahakam. Atas ijin Sultan Aji Muhammad Sulaiman, empat bangsawan dari Banjar yaitu pangeran Permata Sari, Pangeran Singa Menteri, Pangeran Nata dan Pangeran Surya Nata bersama pengikutnya diperkenankan menetap di Tenggarong. Selanjutnya Pangeran Nata lebih memilih bermukim di Muara Pahu yang saat itu diperintah oleh Raden Mara Jelau turunan dari Raden Baroh yang dahulunya merupakan kerajaan otonom kecil di Hulu Mahakam. Secara spontan orang-orang Banjar berdatangan untuk berdagang, mencari ikan dan mengumpulkan hasil hutan terutama rotan dan karet di daerah Mahakam. Pada saat Kesultanan Kutai di pimpin Aji Amidin gelar Pangeran Mangku Negoro, orang-orang Banjar dari Amuntai dan Nagara sengaja didatangkan dan disediakan tempat di Danau Jempang dan Melintang. Mereka membawa bibit ikan sepat dan biawan untuk ditaburkan di danau-danau tersebut. Hingga kini kedua jenis ikan tersebut merupakan komoditi penting hasil tangkapan nelayan di Mahakam Tengah.

Kepandaian orang Banjar dalam berdagang dan memperkenalkan kebudayaan Islam-Banjar sedikit banyak memberi pengaruh terhadap penyebaran Islam dan perkembangan bahasa Melayu dialek Banjar sebagai bahasa pergaulan dan perdagangan. Melalui kepandaian berdagang inipula penyebaran orang Banjar terus berkembang dan bahkan hingga membentuk perkampungan-perkampungan Banjar baru yang terus berlanjut hingga kini.

Mata pencaharian Orang Banjar di Kalimantan Timur sangat bervariasi. Mereka yang bermukim di desa-desa adalah bertani dan nelayan perairan darat (sungai dan danau). Sebagian lagi hidup sebagai pedagang, pegawai, dan pekerja di perusahaan. Pemanfaatan lahan rawa dan perairan sungai serta danau di Kaltim untuk pertanian sawah dan perikanan banyak dilakukan oleh pemukim Orang Banjar. Mereka ada yang telah menetap permanen selama beberapa generasi dan sebagiannya lagi sebagai pendatang musiman yang datang untuk mencari ikan, berdagang, tambang emas tradisional dan bekerja di sektor lain. Di dalam perdagangan, orang-orang Banjar melakukannya secara berkelompok sesuai daerah asal. Mereka berdagang hingga daerah pedalaman dengan memperdagangkan berbagai kebutuhan pokok sembako, elektronik, hasil pertanian dan hasil hutan.



Pemukiman Orang Banjar di sekitar Mahakam Tengah banyak dijumpai di sekitar di Kecamatan Muara Muntai, Muara Kaman, dan beberapa desa di Kahala dan Muara Wis. Di daerah ini Orang Banjar telah bermukim lama dan terus bertambah dengan pendatang pemukim musiman dari Banjar lainnya. Di kecamatan lain mungkin juga terdapat orang Banjar, tetapi jumlahnya sedikit dan kebanyakan sebagai pendatang baru. Di Muara Muntai dan Muara Kaman, pemukim Banjar yang telah lama telah bercampur baur dengan penduduk lokal orang Kutai. Sedangkan pendatang baru atau musiman seringkali mengelompok tersendiri dalam pemukiman yang terkonsentrasi. Di daerah ini dan di sekitar danau Jempang dan Melintang, Orang Banjar bukan saja memperkenalkan budidaya ikan model keramba dan jaring apung, tetapi juga memperkenalkan teknik penangkapan ikan modern lainnya yang destruktif seperti alat setrum, potasium, dan pukat harimau.

Gambar 4. Rona Pemukiman Orang banjar di Sungai Kedang Rantau Nangka Bonah Desa Tunjungan Kecamatan Muara Kaman

3.1.4. Suku Bugis

Di Kalimantan Timur, Orang Bugis atau sering juga di sebut orang 'Ugi' atau 'Ogi' merupakan sebutan umum untuk menyebutkan jatidiri penduduk migran yang berasal dari beberapa kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Di kedua propinsi tersebut terdapat empat suku besar yaitu Bugis, Makasar, Toraja dan Mandar yang mempunyai hubungan linguistik, budaya dan sejarah. Wilayah pemukiman orang Bugis yang berada di tengah dan memungkinkan mereka sebagai satu-satunya suku yang bersentuhan dengan semua suku, serta dominasi dan populasinya yang besar menyebabkan suku lain tidak tampak di mata orang luar, terutama mereka yang juga menganut Islam. Akibatnya di Kalimantan Timur (kecuali Toraja) seringkali dikacaukan istilah 'orang bugis' sebagai sebutan untuk semua orang yang berasal dari Sulawesi Selatan dan Barat. Jikapun dibedakan sebutan Bugis tetap melekat seperti Bugis-Makasar, Bugis-Mandar, Bugis-Bone, Bugis-Wajo, Bugis-Soppeng, Bugis-Sedenreng, Bugis-Bajo, dll.

Orang Bugis selain dikenal sebagai pelaut dan petualang yang tangguh, juga dikenal sebagai perantau yang ulet di banyak tempat di Indonesia termasuk Kaltim. Di Kaltim pemukiman orang Bugis banyak tersebar dan dominan di daerah pesisir pantai. Mobilitas orang Bugis yang tinggi dan memungkinkan mereka menjadi perantau menyebabkan penyebaran orang Bugis secara individu di Kalimantan Timur tidak saja di daerah pesisir, tetapi juga hingga ke pedalaman. Di banyak tempat dapat dijumpai orang Bugis yang sibuk dengan aktivitas pelayaran, perdagangan, pertanian, pembukaan lahan perkebunan, atau pekerjaan apa saja yang sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Kemampuan orang Bugis untuk berubah dan menyesuaikan diri merupakan modal terbesar yang memungkinkan adaptasi mereka dengan penduduk lokal di Kalimantan Timur bertahan dari generasi ke generasi dengan tetap mempertahankan identitas 'kebugisan' mereka.

Pada dasarnya mata pencaharian utama 'orang Bugis' adalah bertani di sawah dan ladang. Aktivitas maritim 'orang bugis' baru benar-benar berkembang pada abad ke-18 Masehi. Komoditas pertanian dan perkebunan 'orang bugis' yang terpenting dan menjadi cikal bakal komoditas perkebunan penting di Kalimantan Timur adalah kopra, coklat, kopi, karet, pisang dan lada. Sejak akhir abad 18, ketika meningkatnya permintaan pasar Eropa akan beberapa komoditi penting dari Nusantara, banyak dimanfaatkan oleh petani dan pedagang Bugis untuk melakukan budidaya tanaman yang mereka butuhkan. Jaringan informasi penanaman dan perdagangan, keuletan petani Bugis serta prestise dan hasrat berkompetisi untuk mencapai kedudukan sosial ekonomi merupakan faktor pendorong utama yang menggerakkan peningkatan sektor pertanian-perkebunan komersil oleh petani Bugis di Kalimantan Timur.

Eksistensi 'orang bugis' di tanah Kaltim sudah berlangsung semenjak abad ke 15 saat awal masuknya pengaruh Islam di Kerajaan Kutai yang dibawa oleh ulama dari Minangkabau yang bermukim di Makasar yaitu Tuan Haji Tunggang Parangan dan Tuan Di Bandang. Selanjutnya antara tahun 1638-1654 atas ijin Sultan Kutai dan Banjar, terjadi migrasi orang-orang Bugis atas permintaan Daeng Patingoaloan Mangkubumi Kerajaan Goa-Tallo di Makasar. Kekalahan Sultan Hasanudin dan jatuhnya Makassar ke tangan Belanda yang diatur dalam perjanjian Bongaya pada tahun 1667 mengakibatkan bangsawan Bugis yang tidak mau tunduk pergi bersama pengikutnya meninggalkan Sulawesi. Para perantau Bugis-Makasar banyak yang berangkat mencari kekayaan dan kejayaan di wilayah lain termasuk di pesisir Kalimantan Timur dengan membuka perkampungan di titik strategis persimpangan jalur perdagangan dan muara sungai. Puncak kejayaan tersebut dimulai saat seorang pangeran Bugis-Wajo bernama La Madukeleng-Arung Singkang meninggalkan Sulawesi bersama 3.000 pengikutnya menuju Paser dan membangun hubungan politik dengan penguasa setempat dan Kerajaan Kutai. Setelah diberi hak untuk mendirikan pemukiman orang Bugis di Samarinda dibawah kepemimpinan Daeng Mangkona, pedagang-pedagang Bugis juga memperoleh hak istimewa untuk memonopoli perdagangan hasil alam dari pedalaman Kaltim. Selain itu mereka juga diberi hak untuk membentuk pemerintahan sendiri serta mengorganisir diri sendiri di bawah pimpinan yang bergelar Pua Ado. Dengan diberikannya gelar kehormatan oleh Sultan Paser dan Kutai, kedudukan mereka sejajar dan keturunannya kelak dapat menikah dengan bangsawan kerajaan.

Perantau dan pemukim Bugis dalam pembukaan lahan perkebunan terjadi pada periode 1885 dan 1920. Meningkatnya permintaan pasar dunia akan komoditi lada, karet, coklat, dan kopra dengan cepat dimanfaatkan perantau Bugis dengan membuka lahan perkebunan dan mendatangkan pekerja baru dari keluarga mereka di tanah asal. Pembukaan pertambangan minyak dan batu bara oleh pemerintah kolonial Belanda dan Jepang di Kalimantan Timur juga dengan cepat direspon oleh orang Bugis dengan menjadi pekerja maupun membuka usaha jasa (perdagangan, transportasi) hingga muncul pemukiman 'orang bugis' baru sekitar perusahaan. Situasi politik yang kacau di Sulawesi Selatan akibat pemberontakan Kahar Muzakar pada tahun 1955-1960 menyebabkan eksodus 'orang Bugis' ke wilayah lain terutama Kaltim meningkat pesat.

Booming kayu gelondongan 'banjir kap' di Kaltim pada sekitar tahun 1969-1970-an memberi andil besar atas akses pemukim 'orang Bugis' di banyak tempat baru sekitar hutan di Kaltim termasuk di sekitar Mahakam Tengah. Saat dimulainya program Intensifikasi Tambak (Intam) tahun 1985 hingga terjadinya krisis moneter yang berimplikasi pada meningkatnya harga komoditi perikanan (ikan dan udang) pada tahun 1997/1998 memberi andil besar bagi pemukim 'orang bugis' yang ahli di sektor perikanan untuk mulai membuka mangrove di sepanjang pesisir Kaltim. Perkembangan sosial politik era otonomi daerah di Kaltim yang memberi stimulasi penting bagi meningkatnya migran baru 'orang bugis' yang mencari peruntungan di Kaltim kian meningkat. Pemukiman dan pembukaan lahan baru mulai terlihat di banyak tempat yang berimplikasi banyak pada munculnya konflik dan tekanan terhadap sumberdaya alam.



Gambar 5. Kapal-kapal angkutan transportasi yang melayani rute Sungai Mahakam mayoritas dimiliki Pengusaha Bugis

Pemukiman 'orang Bugis' di sekitar Mahakam Tengah banyak dijumpai di beberapa desa di Kecamatan Muara Muntai. Di beberapa kawasan tersebut beberapa pemukim orang Bugis sudah cukup lama menentang dan bekerja di sektor jasa perdagangan, pemilik kapal, nelayan keramba dan tengkulak. Pedagang besar dan pemilik kapal kebanyakan dari pendatang Bugis. Karakter orang Bugis yang ulet dan pantang menyerah, merupakan

faktor penting dari kebanyakan orang Bugis yang sukses di perantauan. Dan mereka yang merasa telah sukses tersebut selanjutnya mengajak kerabat dan sanak saudara mereka untuk ikut merantau dan bermukim mengikuti jejak usaha mereka.

3. 2. SEJARAH PEMUKIMAN LOKAL DAN KEJADIAN PENTING

Kawasan Mahakam Tengah memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada abad ke 400 M, Kerajaan Kutai Martadipura dengan rajanya yang terkenal yaitu Mulawarman sudah berdiri. Bukti kebesaran Kerajaan Kutai Martadipura sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia, dibuktikan dengan penemuan prasasti Yupa di Muara Kaman. Penemuan prasasti ini sekaligus sebagai awal babak abad jaman sejarah di Indonesia.

Prasasti Yupa atau sering disebut juga Prasasti Kutai atau Prasasti Mulawarman, adalah sebuah prasasti peninggalan dari Kerajaan Kutai Martadipura yang berpusat di Muara Kaman. Terdapat tujuh buah yupa yang memuat prasasti, namun baru 4 yang berhasil dibaca dan diterjemahkan. Prasasti ini menggunakan huruf Pallawa Pra-Nagari dalam bahasa Sanskerta dan ditulis dalam bentuk puisi anustub. Dari bentuk dan jenisnya diperkirakan berasal dari sekitar 400 Masehi. Penemuan prasasti ini merupakan bukti peninggalan tertua dari kerajaan yang beragama Hindu di Indonesia dan sekaligus bukti bahwa pemukiman orang Kutai di Mahakam Tengah sudah berlangsung ribuan tahun lalu.

Dari tulisan di prasasti yupa diketahui bahwa pada masa pemerintahan Mulawarman, Kerajaan Kutai mengalami masa keemasan. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur saat ini. Raja Mulawarman adalah cucu Kudungga, nama raja yang pertama disebutkan dalam prasasti. Nama Maharaja Kudungga oleh para ahli sejarah ditafsirkan sebagai nama asli orang Indonesia yang belum terpengaruh dengan nama budaya India. Sementara putranya yang bernama Asmawarman (ayah raja Mulawarman) diduga telah terpengaruh budaya Hindu. Hal ini di dasarkan pada kenyataan bahwa kata Warman berasal dari bahasa Sangsekerta. Kata itu biasanya digunakan untuk akhiran nama-nama masyarakat atau penduduk India bagian Selatan.



Gambar 6. Prasasti Yupa dari abad ke 4 Masehi di Muara Kaman Kukar

Pada akhir abad ke 16 Kerajaan Kutai Martadipura atau Kutai Mulawarman, jatuh ke tangan Kerajaan Kutai Kartanegara yang berpusat di Tanjung Kute. Kerajaan Kutai Kartanegara sendiri berdiri pada awal abad ke-13 di daerah yang bernama **Tepian Batu** atau Kutai Lama. Rajanya yang pertama yakni Aji Batara Agung Dewa Sakti (1300-1325). Dalam kitab Kakawin Nagarakertagama (1365), nama kerajaan di Kutai Lama ini disebut dengan nama Kerajaan Tanjung Kute, yaitu salah satu daerah taklukan di negara bagian Pulau Tanjunggagara oleh Patih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit.

Paska takluknya Raja terakhir Kerajaan Kutai Mulawarman yaitu Setia Dharma kepada Kerajaan Kutai Kartanegara di abad `16, Raja Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa yang saat itu menjadi Raja Kutai Kartanegara kemudian melebur kedua kerajaan tersebut dan mengganti nama kerajaan dengan nama **Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura**. Sementara pengikut dan rakyat dari Kerajaan Kutai Mulawarman yang tidak mau tunduk dan ikut melebur dalam kerajaan Kutai Kartanegara menyingkir ke wilayah pedalaman. Mereka itulah yang kemudian menjadi cikal bakal sebutan komunitas Dayak terutama Tunjung dan Benuaq di Mahakam.



Gambar 7. Perpindahan Pusat Pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara dari Kutai Lama Ke Tenggarong

Pada abad ke-17, agama Islam yang disebarkan **Tuan Tunggang Parangan** diterima dengan baik oleh Kerajaan Kutai Kartanegara yang saat itu dipimpin Aji Raja Mahkota Mulia Alam, penerus dari Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa. Setelah beberapa puluh tahun Islam berkembang, sebutan Raja diganti dengan sebutan Sultan. Sultan Aji Muhammad Idris (1735-1778) merupakan sultan Kutai Kartanegara pertama yang menggunakan nama Islami. Dan kemudian sebutan kerajaan pun berganti menjadi

Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura.

Menurut Hikayat Banjar dan Kotawaringin (1663), negeri Kutai merupakan salah satu *tanah di atas angin* (sebelah utara) yang mengirim upeti kepada Maharaja Suryanata, raja Banjar-Hindu (Negara Dipa) pada abad ke-14. Sejak tahun 1636, Kutai diklaim oleh Kesultanan Banjar sebagai salah satu daerah otonom dibawah otorisasi Kesultanan Banjar di Banjarmasin. Kala itu Banjarmasin sudah memiliki kekuatan militer yang memadai untuk menghadapi serangan Kesultanan Mataram yang berambisi menaklukan seluruh Kalimantan dan sudah menduduki wilayah Sukadana (1622). Sebelumnya Banjarmasin sendiri merupakan daerah otonom dibawah kekuasaan Kesultanan Demak (penerus Majapahit). Semenjak runtuhnya Demak (1548), Banjarmasin tidak lagi menjadi bawahan dan berkewajiban mengirim upeti kepada pemerintahan Demak di Jawa.

Sekitar tahun 1638 (sebelum perjanjian Bungaya), Sultan Makassar (Gowa-Tallo) meminjam Pasir serta Kutai, Berau dan Karasikan (Kepulauan Sulu/Banjar Kulan) sebagai tempat berdagang kepada Sultan Banjar IV Mustain Billah/Marhum Panembahan. Permohonan itu disampaikan ketika Kiai Martasura diutus ke Makassar dan mengadakan perjanjian dengan I Mangadacinna Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang Sultan Mahmud yaitu Raja Tallo yang menjabat mangkubumi bagi Sultan Malikussaid Raja Gowa tahun 1638-1654.

Pada Tahun 1747, VOC Belanda mengakui Pangeran Tamjidullah I sebagai Sultan Banjar. Mulanya Sutan Tamjidullah I sebenarnya hanyalah mangkubumi. Namun karena Sultan Tamjidullah I sangat pro VOC Belanda, dia difasilitasi VOC Belanda untuk menjadi Sultan. Sebagai imbal baliknya, pada tahun 1765 VOC Belanda berjanji membantu Sultan Tamjidullah I untuk menaklukan kembali daerah-daerah yang memisahkan diri diantaranya Kutai berdasarkan perjanjian 20 Oktober 1756. Secara politik, VOC memang bermaksud menyatukan kembali daerah-daerah di Kalimantan sebagai daerah pengaruh VOC. Pada saat itu Kutai sendiri masih berada di bawah pengaruh La Maddukelleng yang anti VOC. Pangeran Amir, putra mahkota yang sah dibantu Arung Turawe (kelompok anti VOC) berusaha merebut tahta tetapi mengalami kegagalan.

Pada tahun 1787 Kesultanan Banjar secara penuh menjadi daerah protectorat di bawah pengaruh VOC. Hal itu terjadi setelah Sultan Banjar Sunan Nata Alam membuat perjanjian dengan VOC pada 13 Agustus 1787 tentang penyerahan Kesultanan Banjar kepada VOC. Dalam perjanjian tersebut daerah-daerah lainnya di Kalimantan yang dahulu kala pada abad ke-17 pernah menjadi daerah otonom dibawah kekuasaan Banjarmasin secara sepihak diserahkan sebagai properti VOC Belanda.

Sebelumnya pada tahun 1778, Landak dan Sukadana (sebagian besar Kalbar) telah diperoleh VOC dari Sultan Banten. Para bangsawan yang menolak tunduk kepada VOC eksodus dan mencari suaka ke tempat lain termasuk Kutai, dan kerajaan lain di Kaltim. Setelah sempat terjadi pergantian

kekuasaan dari Belanda ke Inggris dan dikembalikan lagi ke Belanda pada Januari 1817, Belanda memperbaharui perjanjian dengan Sultan Banjar. Negeri Kutai diserahkan sebagai daerah pendudukan Hindia Belanda dalam Kontrak Persetujuan Karang Intan I pada 1 Januari 1817 antara Sultan Sulaiman dari Banjar dengan Hindia Belanda yang diwakili Residen Aernout van Boekholt. Kesadaran bahwa Kerajaan Kutai dan kerajaan lainnya di Kaltim adalah swapraja dan bukan di bawah Sultan Banjar, menjadi alasan penting bahwa perlu pendekatan sendiri terhadap Raja-raja di Kaltim oleh Pemerintah Hindia Belanda.

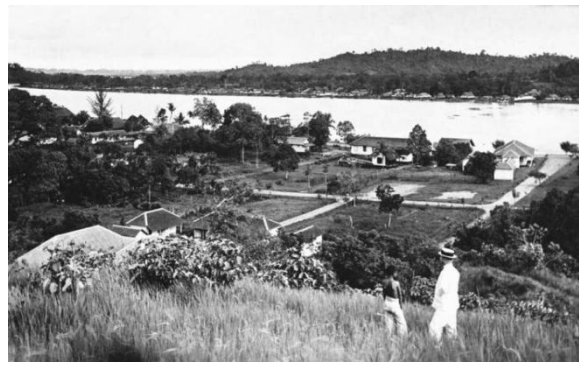
Perjanjian berikutnya pada tahun 1823, negeri Kutai diserahkan menjadi daerah pendudukan Hindia Belanda dalam Kontrak Persetujuan Karang Intan II pada 13 September 1823 antara Sultan Sulaiman dari Banjar dengan Hindia Belanda diwakili Residen Mr. Tobias. Negeri Kutai ditegaskan kembali termasuk daerah-daerah pendudukan Hindia Belanda di Kalimantan menurut Perjanjian Sultan Adam al-Watsiq Billah dengan Hindia Belanda yang ditandatangani dalam loji Belanda di Banjarmasin pada tanggal 4 Mei 1826 atau 26 Ramadhan 1241 H.

Pada tahun 1825, George Muller tiba di Kutai untuk memulai perjanjian dagang atas nama Pemerintah Hindia Belanda dan meneruskan perjalanannya ke Pontianak melalui pedalaman. Sultan Kutai berkeberatan George Muller melakukan perjalanan lewat sungai dan hutan karena dianggap belum aman. G.Muller tidak menghiraukan nasehat tersebut dan terbunuh dalam perjalanan tersebut di perbatasan Kaltim-Kalbar dan Kalteng. Namun demikian, Y. Dalton seorang Inggris yang pernah tinggal 11 bulan semenjak tahun 1827 melaporkan bahwa G. Mueller tidak dibunuh oleh penduduk pribumi tetapi oleh tentara Sultan. Akibatnya nama Sultan Kutai sedikit tercemar dan daerah Kutai dianggap sebagai daerah yang berbahaya bagi pedagang Eropa. Di sisi lain atas alasan mencari kejelasan dan pertanggungjawaban atas kematian G. Mueller, negeri Kutai menjadi sangat mudah untuk ditaklukkan. Nama Sultan baru dapat dipulihkan kembali oleh Asisten Residen H.von Dewall dan S.C. Knapert dan dipertegas lagi atas laporan perjalanan Antoni W. Neuenhuis tahun 1900.

Pada sekitar Pebruari 1844, seorang berkebangsaan Inggris bernama James Erskine Murray mengunjungi Kutai dengan membawa dua buah kapal ke Tenggarong, tapi kemudian diusir oleh Sultan. Di muara kapal mereka dibajak dan dirampok oleh perompak Bajau dari negeri Sulu. Atas pengusiran dan pembajakan tersebut, Pemerintah Hindia Belanda beranggapan bahwa di Kutai telah menjadi wilayah yang tidak aman dan telah terjadi perampokan besar yang harus dihukum. Dengan alasan pemulihan keamanan, Pemerintah Hindia Belanda dibawah kepemimpinan Letnan 't Hoofd menyerang dan membakar kota Tenggarong. Tanggal 7 April 1844 Kota Tenggarong jatuh ke tangan Belanda, dan dalam pertempuran tersebut, Senopati Awang Long tewas. Beberapa bulan paska peperangan, tepat tanggal 11 Oktober 1844 Sultan Kutai menandatangani perjanjian dengan Pemerintah Hindia Belanda. Praktis secara legal Kutai tunduk di bawah pengaruh dan kontrol Pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengurus pemerintahan, Pemerintah Hindia Belanda mengangkat H.von Dewall menjadi asisten Residen pertama berkedudukan di Samarinda. Secara penuh pemerintah Kolonial Belanda mulai ikut campur dalam urusan politik dan pemerintahan di Kutai.

Tatkala Kerajaan Banjarmasin jatuh ke tangan Belanda pada 11 Desember 1859, Sultan Kutai hanya bersikap netral dan tidak membantu rekannya di Banjarmasin sebagaimana raja-raja lain di Kaltim. Atas sikap tersebut Kerajaan Kutai tetap memperoleh status otonomi intern dan tidak diperintah langsung oleh Belanda sebagaimana kerajaan Banjarmasin. Namun demikian, kekuasaan Sultan dibatasi dan bahkan beberapa daerah langsung dimasukkan dalam kekuasaan Belanda terutama bagian ulu Mahakam. Sekitar tahun 1900 distrik Hulu Mahakam yang berpusat di Long Iram didirikan dan langsung dipimpin seorang Kontrolir tersendiri terpisah dari Samarinda.

Paska pendirian kontrolir di distrik Mahakam Ulu, sepanjang Mahakam dianggap telah aman. Para pencari, pengumpul dan pedagang hasil hutan (rotan, getah damar, sarang burung dan tengkawang) merasa aman dan mulai berdagang dengan leluasa di sepanjang Mahakam. Misi agama Katholik mulai diperkenalkan terutama kepada komunitas Dayak yang dianggap belum beragama. Ketika seluruh Mahakam ulu telah dikuasai dan berada dibawah kekuasaan Belanda, praktis sepanjang aliran Mahakam berada dalam pengaruh dan kontrol Pemerintah Kolonial Belanda. Untuk meningkatkan



Gambar 8. Pusat Pemerintahan Kolonial Belanda di Tepi Sungai Mahakam Samarinda

pendapatan negara yang terlilit utang paska perang dunia pertama, pemerintah Kolonial memberlakukan wajib pajak. Pemerintah Kolonial Belanda memberikan maklumat untuk pengaturan wajib pajak/cukai (pajak kepala) atas hasil-hasil sumberdaya alam di wilayah Mahakam. Setiap penduduk yang memiliki tanah milik didata dan didaftarkan. Semenjak itu dikenal istilah *lembo* di wilayah Mahakam sebagai tanah milik yang merujuk pada tanah kebun/buah.

Awal Februari 1942, tentara Jepang menduduki dan menguasai seluruh Samarinda. Orang-orang Belanda mengungsi dan lari ke ulu. Bulan Maret dan April 1942, tentara Jepang mulai masuk pedalaman hingga pada bulan Juni 1942 sudah menuju Ulu Riam Mahakam. Semua orang Belanda yang berada di pedalaman ditangkap dan dibawa ke kamp-kamp tahanan, sedangkan tentara Belanda langsung dibunuh. Pemboman lapangan terbang di Barong Tongkok yang kala itu dikenal dengan sebutan Samarinda II, menyebabkan warga banyak yang takut dan memilih tinggal di ladang dan hutan. Warga baru kembali setelah Jepang menyerah dan pergi meninggalkan wilayah Mahakam paska tahun 1945.

Paska kemerdekaan 1945, wilayah Mahakam belum sepenuhnya aman. Ketiadaan kepastian pemerintahan menyebabkan perdagangan hasil hutan secara ilegal semakin meningkat. Situasi internal di Kesultanan Kutai pun tak kalah pelik. Perdebatan untuk menjadi bagian dari NKRI atau menjadi daerah otonom sendiri terpisah dari NKRI mulai merebak. Puncaknya pada masa peralihan pengakuan kedaulatan RI tahun 1949 setelah perjanjian Meja Bundar. Terdapat kelompok yang Pro Republik dan memilih bergabung dengan NKRI dan kelompok-kelompok yang memilih status quo dan bergabung dalam Negara Indonesia Timur. Pembentukan Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 1959 yang menggabungkan sekaligus menghapuskan empat kesultanan yaitu Tidung-Bulungan, Berau, Kutai dan Paser kurang banyak diketahui dan direspon oleh penduduk di Mahakam.

Pada masa pemerintahan orde lama, pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno lebih banyak disibukkan oleh upaya konsolidasi dalam hal penegakkan negara kesatuan dalam meredam gejolak-gejolak di tiap daerah yang ingin memisahkan diri. Di Sulawesi Selatan terjadi pemberontakan Kahar Muzakar. Di Kalimantan Barat, terjadi pemberontakan yang dikenal gerakan Separatis Parakau. Sementara di Kalimantan Selatan, terjadi pemberontakan DI /TII yang dipimpin Ibnu Hajar. Aksi-aksi militer yang dilakukan pemerintah RI untuk meredam berbagai gejolak tersebut menyebabkan rakyat di Sulsel, Kalbar dan Kalsel merasa kurang aman. Sebaliknya di Kaltim yang kurang banyak terjadi gejolak, keadaan lebih kondusif. Para pengikut Kahar Muzakar dan Ibnu Hajar maupun kerabat yang merasa terancam, banyak yang eksodus keluar Sulsel dan Kalsel terutama ke Kaltim. Migrasi orang Bugis dan Banjar ke daerah Mahakam meningkat tajam. Mereka mengungsi ke tempat-tempat kerabat mereka yang sudah menetap di Mahakam dan menjadi

pedagang, nelayan dan petani sawah. Mereka memperkenalkan cara-cara membuka lahan-lahan baru untuk kegiatan pertanian sawah kepada penduduk lokal Kutai.

Jatuhnya pemerintahan orde lama pada akhir tahun 1965 dan berkuasanya Jenderal Soeharto sebagai Presiden yang dikenal sebagai masa Pemerintahan Orde Baru, memberi banyak harapan bagi rakyat di Mahakam untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sekolah dan pelayanan kesehatan mulai dibangun di banyak tempat. Pada masa transisi antara 1965 hingga 1970-an, terjadi kegiatan *booming* pembalakan kayu yang dikenal dengan sebutan jaman '*banjir kap*'. Pada masa ini penduduk usia produktif berbondong-bondong terlibat dalam penebangan kayu untuk dijual kepada pembeli-pembeli yang datang langsung ke kampung-kampung. Penduduk dari luar Kaltim seperti orang Bugis dari Sulawesi, dan orang Banjar dari Kalsel yang mendengar kemakmuran dari masa *banjir kap* tersebut, berbondong-bondong datang ke Mahakam untuk bekerja dalam kegiatan pembalakan kayu. Namun pada sekitar tahun 1970-an ketika pemerintah Soeharto mengeluarkan kebijakan pemberian konsesi HPH kepada perusahaan-perusahaan asing, pembalakan kayu yang disebut *banjir kap* tersebut mulai berkurang. Orang Bugis dan Banjar yang terlanjur betah dan merasakan kenyamanan menetap di Mahakam membuat pemukiman tersendiri bergabung dengan penduduk lokal atau terpisah dan mendirikan pemukiman yang menjadi desa definitif tersendiri.

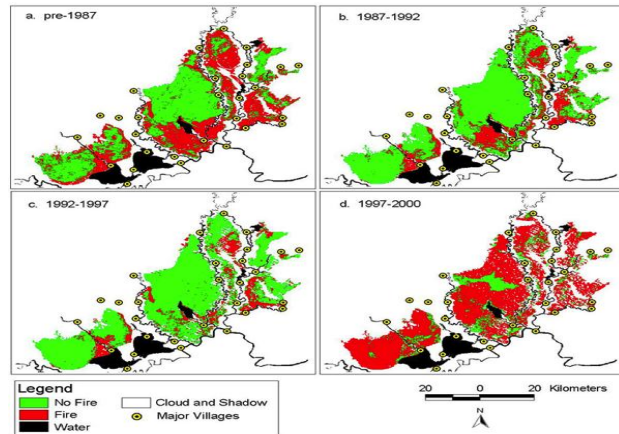
Pada tahun 1972, terjadi kemarau panjang yang menyebabkan sungai kering dan wabah muntaber. Saat itu terjadi kebakaran hutan di beberapa tempat di Mahakam tetapi tidak berlangsung lama. Kebakaran hutan yang hebat dan menghanguskan ratusan ribu hektar di Mahakam baru terjadi sepuluh tahun kemudian ketika kemarau panjang kembali terulang di tahun 1982/1983. Kemarau panjang selama lebih dari 9 bulan menyebabkan transportasi sungai terhenti. Penduduk mengalami kesulitan memperoleh bahan sembako dan eksodus ke beberapa tempat di hilir yang lebih mudah untuk memperoleh kebutuhan dan sumber penghidupan baru. Pada saat yang bersamaan, setahun sebelum kemarau dan kebakaran hutan melanda Mahakam, telah dimukimkan sejumlah penduduk transmigran di wilayah daratan seperti Muara Kaman, Kota Bangun dan Sebulu. Bagi masyarakat transmigran Jawa, kebakaran hutan dan lahan yang begitu hebat menjadi pengalaman pertama mereka di tempat baru.



Gambar 9. Kebakaran Hutan yang Secara Periodik Terjadi di Mahakam Tengah

Pada awal tahun 1990-an, perdagangan rotan mulai berkurang karena harga yang anjlok. Sementara hasil hutan lain seperti damar dan tengkawang tidak ada lagi pembelinya. Namun demikian sarang burung, kulit kayu gemor, gaharu dan getah karet mulai meningkat harganya. Orang-orang mulai pergi ke hutan-hutan untuk mencari gaharu, kulit kayu gemor dan sarang burung wallet. Di Mahakam Tengah, penduduk selain bekerja menjadi nelayan, juga bekerja mengumpulkan hasil hutan dari kayu gemor. Perdagangan dari komoditi perikanan keluar Kaltim semakin meningkat setelah jalur transportasi darat mulai menjangkau wilayah Mahakam Tengah melalui Kota Bangun, Sedulang dan Sebintulung menghubungkan langsung dengan Samarinda, Balikpapan dan Banjarmasin.

Pada tahun 1997/1998, kemarau panjang kembali melanda wilayah Mahakam. Hutan-hutan yang mulai gundul akibat penebangan oleh perusahaan maupun masyarakat yang menebang secara ilegal, kering kerontang. Kebakaran hutan yang hebat dan luas kembali terulang. Krisis moneter yang ditandai jatuhnya nilai rupiah terhadap dollar, melambungkan harga komoditi ekspor. Di Mahakam Tengah penduduk mencari ikan di danau-danau yang mengering dengan membakar semak dan hutan untuk memudahkan akses mereka menjangkau danau-danau di tengah hutan yang masih menyediakan ikan dan komoditi lainnya. Bidawang atau kura-kura Malaya menjadi komoditi utama karena harganya yang berlipat kali lebih mahal. Bagi sebagian besar penduduk di wilayah daratan, kemarau dan kebakaran hutan menjadi sumber petaka yang menghabiskan sumber-sumber kehidupan. Namun bagi penduduk di wilayah sekitar danau dan rawa gambut, kemarau menjadi berkah karena mereka dapat mencari ikan yang terjebak dengan mudah di danau-danau yang mengering. Kebakaran hutan selain memudahkan akses untuk menjangkau danau-danau baru yang semula sulit dijangkau, juga mengakibatkan danau yang meluas maupun terjadinya danau-danau baru akibat rawa gambut yang terbakar. Danau yang semakin meluas serta danau-danau yang terbentuk baru tersebut menjadi lokasi-lokasi baru tempat mencari ikan yang semakin luas pula.



Gambar 10. Sejarah Kebakaran Hutan di daerah Mahakam Tengah (Sumber: Chokkalingam et al, 2005)

Perkembangan paling penting yang cukup drastis dalam situasi sosial, politik dan ekonomi di Mahakam terjadi setelah masa reformasi tahun 1999. Pemekaran Kabupaten Kutai menjadi beberapa kabupaten baru dan mengubah kembali nama Kutai menjadi Kutai Kartanegara berimplikasi terhadap pembangunan di wilayah Kutai. Dana pembangunan yang berlimpah setelah adanya kebijakan dana perimbangan pusat dan daerah bagi daerah penghasil Migas, menyebabkan Kutai Kartanegara menjadi kabupaten terkaya di Indonesia. Dana pembangunan yang digelontorkan ke desa-desa melalui Program Gerbang Dayaku yang dicanangkan Bupati Kutai Saucani HR melalui proyek pemberian dana Rp 2 Milyar perdesa menjadi inspiratif geliat pembangunan di wilayah Mahakam. Proyek-proyek fisik banyak membantu desa-desa di Mahakam yang semula sangat minim infrastruktur.

Dari aspek lingkungan, paska reformasi menjadi masa-masa terburuk. Tutupnya beberapa perusahaan HPH yang bangkrut paska krisis moneter, serta kebijakan baru di sektor Kehutanan yang memberi ruang bagi pembalakan kayu oleh masyarakat melalui ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) per individu seluas 100 ha, berpengaruh buruk terhadap laju pembalakan. Kemudahan ijin yang cukup mudah hanya dari Bupati, direspon cukup cepat oleh para cukong kayu untuk memfasilitasi masyarakat memperoleh ijin dan melakukan penebangan kayu atas nama masyarakat. Beberapa perusahaan yang disebut masyarakat sebagai mitra kerja dari ijin yang diperoleh mulai beroperasi untuk menebang kayu di hutan-hutan bekas perusahaan maupun hutan-hutan primer yang masih dalam klaim milik masyarakat. Sebagai kompensasi, perusahaan memberikan sejumlah *fee* per kubik kepada masyarakat.

Berdirinya perusahaan MDF Sumalindo di Sebulu yang semula konsisten memperoleh suplai bahan baku dari perusahaan HTI, tiba-tiba terhenti paska perusahaan HTI tersebut bangkrut di tahun

2000-an. Untuk menghindari kebangkrutan, perusahaan menampung dan membeli kayu jenis apapun dari masyarakat. Secara sporadis masyarakat di Mahakam mulai menebang kayu-kayu di tepi sungai di bekas perladangan maupun hutan primer untuk dijual ke MDF Sumalindo. Mereka menyebutnya kerja *kayu bandalan* atau kerja kayu 2 meter. Pada saat bersamaan permintaan kayu untuk kayu pertukangan dari jenis Kahoi (*Shorea blangeran*) sebagai pengganti ulin (*Eusideroxylon zwageri*) dan bangkirai (*Shorteia laevis*) mulai meningkat. Semenjak itulah kegiatan penebangan kayu di hutan rawa untuk memenuhi pabrik MDF Sumalindo maupun untuk bahan baku sawmill di kampung semakin menggila.

Selain masa-masa penduduk sibuk menebang kayu dan memperoleh *fee* dari perusahaan, pada periode awal tahun 2000 hingga tahun 2005, penduduk juga disibukkan oleh proyek-proyek pemerintah yang masuk di desa. Proyek-proyek tersebut terutama kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dari Dinas Kehutanan yang disebut DAK DR dan Gerhan (Gerakan Rehabilitasi Lahan), serta proyek pemerintah daerah melalui Gerbangdayaku. Kesiapan sumberdaya dan kelembagaan lokal yang masih lemah, serta tingkat partisipasi masyarakat yang belum maksimal terhadap proyek-proyek pemerintah menyebabkan hasil-hasil proyek (utamanya proyek fisik) kerap kali kurang bermanfaat. Lahan-lahan bekas RHL tidak sedikit yang gagal ataupun habis ditambang. Sementara dari proyek fisik, kurangnya pengawasan dan pemeliharaan, tidak sedikit proyek-proyek infrastruktur dan fasilitas yang cepat rusak atau tidak berfungsi maksimal.

Pada sekitar tahun 2005-2007, melalui program sawit sejuta hektare Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berambisi membuka lahan perkebunan sawit di sejumlah kabupaten. Situasi pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang kurang kondusif akibat krisis kepemimpinan dan politik lokal yang tidak stabil, dimanfaatkan secara optimal oleh para investor untuk memperoleh ijin-ijin konsesi perkebunan dan batubara. Perusahaan perkebunan kelapa sawit terlihat dominan invasi di daerah sekitar rawa gambut, sementara perusahaan batubara di wilayah daratan kering. Eeksploitasi sumberdaya alam dan konversi hutan dan lahan terjadi dimana-mana. Pemekaran desa yang tidak dibarengi dengan penataan batas dan penggunaan ruang desa, memicu konflik penggunaan lahan yang terjadi di banyak tempat yang terdapat ijin konsesi.

Di sekitar tiga danau besar di Mahakam Tengah yang dikenal sebagai kawasan rawa gambut terluas terjadi degradasi dan deforestasi yang kian masif. Beberapa perusahaan yang memperoleh konsesi ditolak warga karena beresiko terhadap kegiatan perikanan sekitar danau. Beberapa perusahaan lain juga tidak bisa beroperasi karena sulit melakukan konversi pembukaan lahan akibat kedalaman



Gambar 11. Kegiatan Pembalakan kayu oleh masyarakat di Hutan Rawa Gambut

gambut yang dalam dan lokasi yang rendah. Belakangan, kegiatan penangkapan ikan disinyalir juga mulai berkurang akibat kedatangan nelayan-nelayan dari luar yang meningkat dan memperkenalkan alat-alat penangkapan ikan yang ilegal dan tidak ramah lingkungan, maupun kualitas air yang buruk. Situasi ini memperparah ancaman terhadap sumber penghidupan masyarakat sekitar tiga danau yang hingga kini masih sangat tergantung dengan kemurahan dan keramahan lingkungan.

Dari rangkaian peristiwa sebagaimana diungkap di atas, jelas sekali bahwa dalam konteks kemasyarakatan yang ditandai hubungan Kutai-Bugis, Kutai-Banjar dan Kutai-Jawa, sudah berlangsung semenjak ratusan tahun lalu sebelum masa

pendudukan Belanda. Hubungan tersebut terus berlanjut dalam masa-masa pendudukan Kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan dan saat ini. Dalam konteks lingkungan, perubahan-perubahan besar di Mahakam terjadi justeru paska kemerdekaan yang dimulai dengan aktifitas pembalakan kayu *banjir kap*, kebakaran hutan yang terus berulang di setiap musim kemarau panjang, dan konversi hutan dan lahan untuk industri perkebunan kelapa sawit dan batubara. Nampaknya situasi sosial politik di masa kerajaan hingga masa kolonial dan kemerdekaan saat ini, memiliki hubungan yang signifikan terhadap perubahan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan di Negeri Kutai pada umumnya dan masyarakat sekitar danau di Mahakam Tengah khususnya. Negeri Kutai yang gemilang dan makmur sebagai cikal bakal sejarah peradaban di Indonesia di abad ke 4 lalu, harus menjadi inspiratif bagi momentum kebangkitan kembali negeri Kutai. Aspek-aspek sosial kemasyarakatan yang spesifik dan faktor-faktor lingkungan yang mendukung di sekitar rawa gambut Mahakam Tengah menjadi titik balik bagi kebangkitan Kutai untuk meraih kembali kemakmuran dan kebanggaan yang pernah di raih pendahulu Kutai di masa lalu.

BAGIAN 4

KONTEKS KERENTANAN DAN KECENDERUNGAN

4.1. KERENTANAN DAN MASALAH

Mayoritas penduduk Mahakam Tengah bekerja di sektor pertanian dan perikanan. Kedua sektor ini secara alamiah memiliki kerentanan yang cukup tinggi. Kerentanan mereka yang berprofesi sebagai petani dan nelayan ini diperparah dengan kondisi lingkungan yang semakin tidak menentu sejalan dengan adanya perubahan iklim. Semakin sensitifnya pengaruh bencana dan kondisi darurat tidak terduga yang terjadi terhadap sumberdaya alam, pada akhirnya akan berdampak terhadap kesejahteraan suatu komunitas.

Kerentanan dapat diartikan sebagai sekumpulan kondisi yang mengarah dan menimbulkan konsekuensi (fisik, sosial, ekonomi dan perilaku) yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan keadaan yang tidak terduga/darurat (bencana, krisis, konflik, dll). Menurut ilmu sosial, kerentanan (*vulnerability*) merupakan kebalikan dari ketangguhan (*resilience*), dimana kedua konsep tersebut laksana dua sisi mata uang. Konsep ketangguhan merupakan konsep yang luas, didalamnya termasuk kapasitas dan kemampuan merespon dalam situasi krisis / konflik /darurat (*emergency response*). Kerentanan, ketangguhan, kapasitas, dan kemampuan merespon dalam situasi darurat, bisa diimplementasikan baik pada level individu, keluarga, masyarakat, dan institusi (pemerintah maupun NGO). Penilaian ketangguhan (*resilience*) dan kerentanan (*vulnerability*) sangat diperlukan untuk tujuan sebagai berikut:

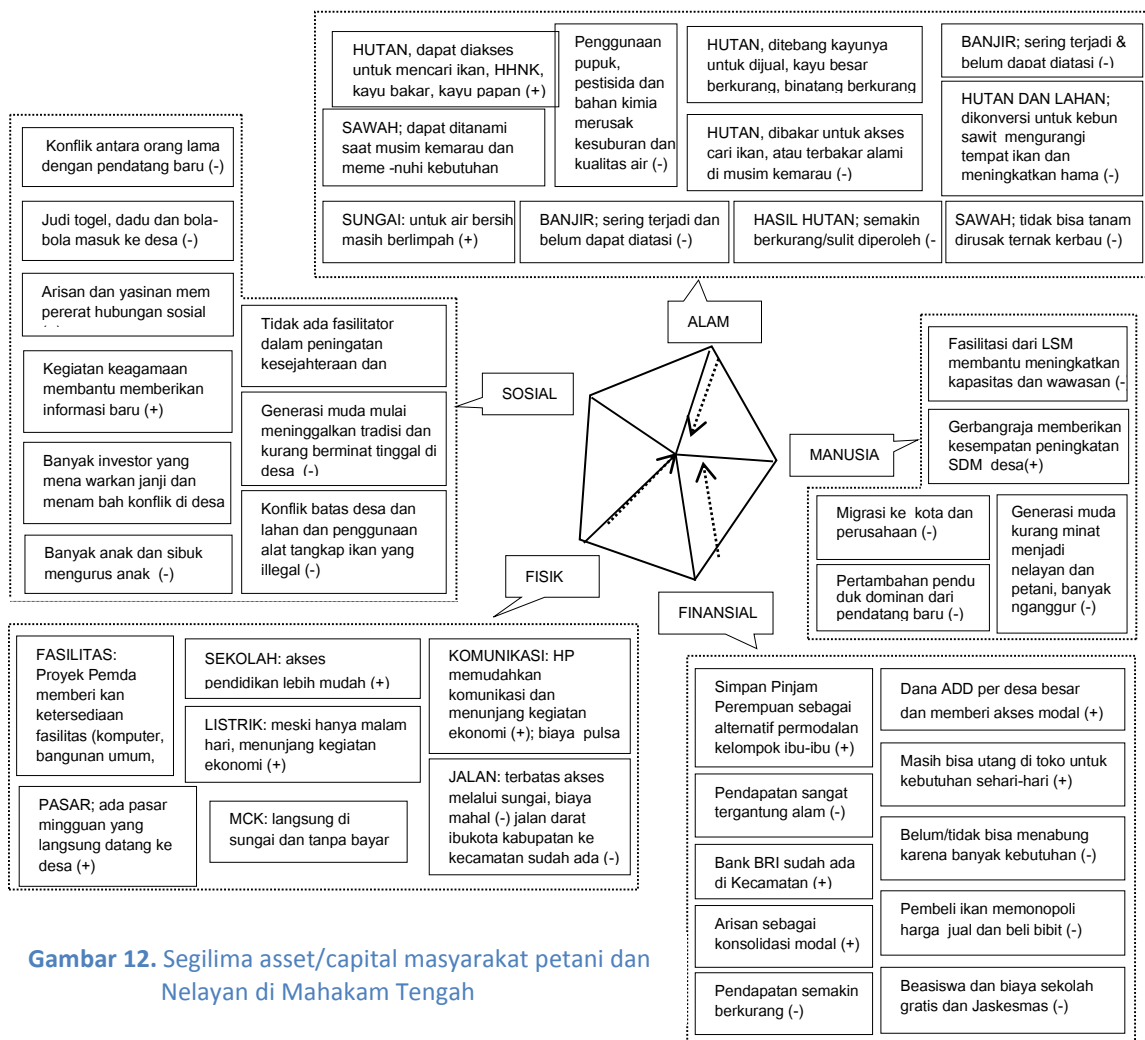
- Memahami pengalaman masyarakat sebelumnya dengan bahaya yang memungkinkan mereka mengembangkan strategi pencegahan dan penanggulangan;
- Memahami sumberdaya yang tersedia dan digunakan komunitas dalam mengurangi risiko. Siapa yang mempunyai akses ke sumberdaya ini dan siapa yang mengontrol;
- Merupakan langkah penting dalam memilih strategi pengurangan risiko bencana, krisis dan situasi darurat yang dialami komunitas dan penguatan kemampuan;
- Meningkatkan pemahaman kemampuan masyarakat sebagai sumberdaya penting dalam merespon bencana, krisis dan situasi darurat.

Kesejahteraan sebagai indikator kemampuan (*capability*) dan ketangguhan (*resilience*), sangat tergantung kepada besarnya akses dan kontrol masing-masing manusia sebagai mahluk sosial terhadap modal penghidupannya, atau sering juga disebut sumber-sumber penghidupan (*livelihood assets*). Apakah kemudian individu tersebut mendapatkan kebutuhan dasar sesuai dengan kebutuhannya atau tidak tergantung kepada seberapa besar akses dan kontrolnya terhadap sumber-sumber atau modal penghidupannya. Modal penghidupan atau *livelihood assets* atau disebut juga sumber-sumber penghidupan dapat dibagi menjadi 5 kelompok yang sering juga disebut sebagai *pentagon assets* atau *pentagon capital*. Kelima kelompok modal penghidupan tersebut adalah:

1. *Humane Assets* (sumber daya manusia); meliputi ketrampilan, kreatifitas, tenaga, kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan kerja, dsb.
2. *Natural Assets* (sumber daya alam); meliputi tanah, hutan, air, kualitas udara, perlindungan terhadap erosi, keanekaragaman hayati, dsb.
3. *Social Assets* (keanggotaan sosial); meliputi kekuatan ikatan sosial, jaringan pengaman sosial, dll.
4. *Infrastructure Assets* (Infrastruktur/fasilitas umum); meliputi rumah, jalan, telepon, irigasi, dsb.
5. *Financial Assets* (keuangan); meliputi uang dimiliki, lembaga keuangan formal dan informal.

Besarnya akses dan kontrol setiap manusia ke kelima modal penghidupan ini menggambarkan tingkat kerentanannya. Semakin besar akses dan kontrolnya maka semakin kuatlah dia dalam mempertukarkan hak-hak kehidupannya. Semakin kecil akses dan kontrolnya maka semakin rentanlah dia. Manusia atau komunitas yang berada dalam posisi rentan menjadi sangat mudah mendapat bahaya atau bencana ketika ada perubahan dari luar yang bersifat ancaman.

Tidak dapat dipungkiri bahwa situasi dan kondisi individu, keluarga, masyarakat maupun unit sosial yang lebih tinggi adalah merupakan persoalan struktural. Kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh struktur (institusi dan tingkatannya) dan proses (kebijakan) di dalam sistem tersebut. Pendekatan *Sustainable Livelihood* menekankan pemahaman akan keterkaitan antara persoalan mikro dan makro. Pada gambar di bawah ini diperlihatkan diagram dari visualisasi perpaduan antara temuan-temuan yang berkaitan dengan akses sumber penghidupan terhadap modal fisik, alam, finansial, sosial dan manusia pada masyarakat petani dan nelayan di Mahakam Tengah.



Gambar 12. Segilima asset/capital masyarakat petani dan Nelayan di Mahakam Tengah

Gambar 12 di atas menunjukkan hubungan dan bentuk dari masing-masing segilima aset yang bila di deskripsikan dan dianalisis maka dapat dirumuskan indikator sosial ekonomi keluarga petani dan nelayan di Mahakam Tengah sebagai berikut.

- 1) Indikator kerentanan ekonomi keluarga adalah : pendapatan per kapita, tanggungan keluarga, Ketergantungan atau tingginya kebutuhan akan bantuan ekonomi dari luar (*Relief/welfare*)

dependency), akses kesempatan bekerja, akses dan kontrol terhadap sarana produksi (tanah, sarana pertanian, ternak, modal), ketersediaan mekanisme kemunduran ekonomi, Berhutang terutama hutang untuk pemenuhan kebutuhan pangan harian (*Indebtedness*), Bergantung pada hanya satu sumber nafkah (*non-diversified economy*)

- 2) Indikator Kerentanan sosial keluarga adalah : lama pendidikan dan keahlian ketrampilan, jumlah anggota keluarga, jumlah anggota keluarga yang sakit, akses informasi, kedekatan jejaring sosial yang memiliki potensi ekonomi, Praktek yang tidak adil, tidak adanya akses ke proses politik, Rumor dan konflik, kelembagaan dan organisasi masyarakat (formal dan informal), hubungan dan akses dengan pelayanan pemerintah, Keluarga atau struktur kekerabatan yang lemah, Tak adanya kepemimpinan/inisiatif/ struktur organisasi untuk memecahkan masalah atau konflik, Pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat/kelompok.
- 3) Indikator Kerentanan Fisik-Lingkungan: Letak rumah penduduk, sawah/ladang, Ketersediaan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, air minum, perumahan, sanitasi), infrastruktur (jalan, listrik, komunikasi), rancang bangun bangunan rumah dan fasilitas umum terhadap banjir dan bencana, Sumber penghidupan yang tak aman dan berisiko, Sumberdaya alam yang terlalu dieksploitasi, isolasi geografi, Pengelolaan sampah dan limbah domestik yang kurang baik terutama yang memenuhi sungai dan sekitar rumah, Berkurangnya atau rusaknya kawasan lindung rawa gambut tempat bepijah benih ikan, Pendangkalan sungai karena erosi yang terbawa dari daerah hulu, Perubahan iklim/cuaca global yang meningkatkan intensitas kekeringan dan banjir dalam tahun-tahun terakhir;
- 4) Indikator kerentanan sikap/prilaku: Sikap negatif terhadap perubahan, Kepasifan/fatalistic/ tak punya harapan dan ketergantungan, Tak ada inisiatif dan 'semangat juang' , Tak ada kesatuan/ kerjasama dan solidaritas; Kepercayaan/ideologi negative, Ketidaksadaran mengenai bahaya dan akibatnya, Ketergantungan pada bantuan luar.

Selain indikator di tingkat keluarga , pencari dari kelompok keluarga petani dan nelayan yang rawan bencana adalah pola nafkah tunggal (*non-diversified economy*), karena terbatasnya kesempatan untuk memilih, dan hasil usahanya sebagian untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (*subsistence*), Pada kelompok nelayan yang memiliki keterbatasan alat tangkap, usaha nelayannya hanya mampu mengusahakan satu/beberapa jenis alat tangkap saja. Nelayan seperti ini biasanya juga sangat tergantung dengan musim dan ketersediaan lokasi-lokasi terbaik yang masih banyak dijumpai ikan. Biasanya ketika musim ekstrem dan lokasi-lokasi tempat biasanya mereka mencari ikan berubah/hilang, kelompok nelayan ini tidak biasa lagi memiliki alternatif sumber penghidupan.

Kerentanan lain yang dijumpai di tingkat keluarga di Mahakam Tengah adalah diversifikasi dan kombinasi antara kegiatan nelayan dan pertanian yang telah berubah. Dahulu penadapatan tunai diperoleh dari kegiatan nelayan, sedangkan kebutuhan pangan diperoleh dari kegiatan pertanian sawah dan ladang. Semenjak peningkatan populasi ternak *kerbau kalang*, kegiatan pertanian sawah sulit dilakukan karena ancaman kerbau yang menginjak-injak tanaman. Demikian juga dengan serangan hama babi dan tikus yang meningkat setelah rusaknya hutan di sekitar perkampungan.

Secara umum, indikator kerentanan di tingkat keluarga memunculkan indikator kerentanan sosial ekonomi di tingkat wilayah. Artinya jika keluarga-keluarga di Mahakam Tengah alami kerentanan, maka secara otomatis akumulasinya menunjukkan kerentanan di wilayah Mahakam Tengah. Terkait kerentanan sosial dan sikap petani dan nelayan di Mahakam Tengah sebagai bagian dari masyarakat marjinal, maka perlu peningkatan kapasitas sosial, budaya dan perilaku baik kepada tingkatan individu, keluarga, masyarakat dan institusi. Kapasitas sosial tersebut berupa penguatan dan perluasan mekanisme coping (*coping mechanisms*) dan strategi adaptasi pada level keluarga, penguatan modal sosial pada tingkatan masyarakat dan institusi, *good governance*, kepemimpinan formal dan infomal, akuntabilitas, serta kesiapsiagaan dan perencanaan penanggulangan bencana

dan tindak darurat di tingkat kelembagaan sosial dan organisasi formal. Sedangkan untuk kerentanan ekonomi, maka perlu peningkatan kapasitas ekonomi untuk menyediakan lingkungan yang menjamin pola nafkah penduduk (*secure livelihoods*) baik melalui penanaman modal dan investasi (*economic capital*), bantuan modal usaha (*financial reserves*), dan upaya diversifikasi pertanian dan usaha (*diversified agriculture and economy*).

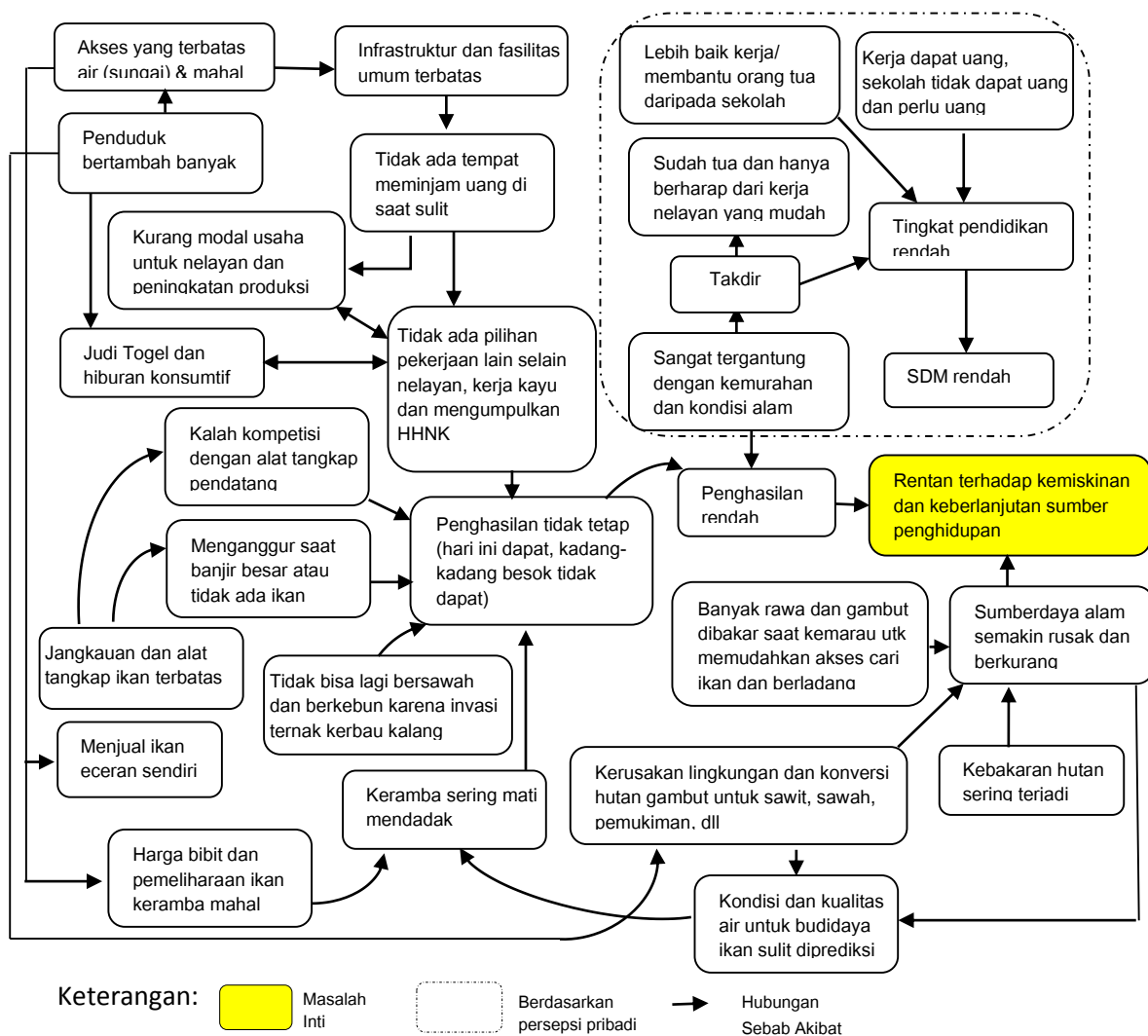
Orang terlemah di dalam komunitas pun mempunyai beberapa ketrampilan, sumber dan kekuatan untuk menolong dirinya sendiri dan mungkin menolong orang lain. Dalam hal ini sikap dan perilaku sosial yang ada dalam suatu komunitas mempengaruhi perilaku tersebut. Hubungan ini juga dapat diperlihatkan dari persepsi dan pola hubungan antara kelompok kaum lelaki dan kaum perempuan dalam suatu keluarga/komunitas. Keluarga yang sumber penghidupannya dominan kaum lelaki lebih rentan dibandingkan dengan keluarga yang sumber penghidupannya dari lelaki dan perempuan.

Di Mahakam Tengah, secara umum sumber penghidupan memang masih mayoritas dari kelompok laki-laki. Namun demikian, kelompok perempuan secara langsung maupun tidak langsung juga berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan dan penghidupan keluarga di Mahakam Tengah. Kelompok perempuan yang menopang kehidupan dilakukan secara tidak langsung seperti menyiapkan dan memperbaiki alat-alat tangkap ikan, bercocok tanam, dan membantu penyiangan ikan. Beberapa kelompok perempuan dijumpai secara langsung dan mandiri melakukan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan seperti membuat anyaman tikar dan topi, membuat ikan asap, pengeringan ikan asin dan memancing.

Tabel 2. Pengelompokan Permasalahan yang Ditemui di Mahakam Tengah Berdasarkan Gender

Kaum Lelaki	Kaum Perempuan
Tidak ada atau kurang modal	Bahan baku untuk anyaman semakin semakin jauh dan tidak ada yang membantu
Hasil tangkapan berkurang karena nelayan pendatang semakin meningkat dengan alat tangkap baru dan tidak lestari	Tidak ada keahlian selain memasak dan mengolah ikan
Rawa gambut tempat ikan berpijah dan berkembangbiak banyak berubah fungsi untuk perkebunan sawit	Tidak ada hiburan kecuali TV, Listrik hanya malam hari
Tidak ada pemasukan selama 2 bulan musim banjir besar	Tidak ada teknologi untuk paska produksi
Tidak ada lembaga yang membantu nelayan untuk meningkatkan hasil	Banyak judi togel dan anak muda yang berlaku kriminal di kampung
Tidak ada yang memfasilitasi untuk pengembangan pemasaran	Biaya kebutuhan hidup naik terus dan semakin bertambah terutama pulsa telepon
Tidak ada usaha dan ketrampilan lain selain menjadi nelayan dan kerja kayu	Pendapatan suami tidak tentu
Kerja kayu tidak aman dan resiko besar	Pendidikan dan pendapatan yang rendah
Penggunaan alat tangkat ikan dengan setrum dan racun membuat benih ikan banyak mati	Sering banjir besar lebih dari dua bulan
Banyak investor datang membawa janji untuk investasi	Banyak anak dan sibuk mengurus anak
Alat tangkat ikan dirusak kerbau, babi	Tidak lagi bisa berkebun saat kemarau karena meningkatnya ternak kerbau di kampung

Apabila merunut pada hubungan sebab akibat dari berbagai permasalahan yang ditemui di Mahakam Tengah, hasil wawancara, FGD dan analisa yang dilakukan memperlihatkan bahwa sesungguhnya inti permasalahan yang ditemui yang menuju pada kondisi kerentanan munculnya kemiskinan adalah masalah keberlanjutan sumber penghidupan. Kerangka keberlanjutan sumber penghidupan menjadi masalah inti dikarenakan faktor-faktor utama yang mendukung sumber penghidupan saat ini yaitu ketersediaan sumberdaya alam dari hutan rawa gambut semakin menurun kualitas dan kuantitasnya. Kondisi tersebut secara nyata saat ini mempengaruhi tingkat pendapatan yang menurun dan tidak tetap, serta biaya kebutuhan dasar yang meningkat karena tidak lagi terpenuhi dari ketersediaan sumberdaya alam, misalnya air bersih, pangan, dan kebutuhan subsisten lain yang hilang. Secara detil rangkaian dari hubungan sebab akibat permasalahan di Mahakam Tengah diperlihatkan dalam diagram dibawah ini.



Gambar 13. Diagram Alur Permasalahan dan Kerentanan di Mahakam Tengah

4.2. Kecenderungan dan Perubahan

Kecenderungan dan perubahan merupakan satu alat pendekatan partisipatif untuk melihat dan menggambarkan trend serta perubahan-perubahan berbagai keadaan, kejadian serta kegiatan masyarakat dari waktu ke waktu. Trend perubahan yang diamati dapat berkurang, tetap atau bertambah secara kualitas maupun kuantitasnya.

4.2.1. Berkurangnya Akses Masyarakat Terhadap Sumberdaya Alam

Kebanyakan masyarakat yang tinggal di pedesaan bergantung pada sumberdaya alam dalam segala bentuknya. Di Mahakam Tengah sumberdaya alam utama yang menjadi sumber ketergantungan tersebut adalah hutan rawa gambut, lahan sawah dan tegalan, sungai dan danau. Analisa kausal oleh masyarakat di Desa Muara Siran, Kupang Baru, Muara Enggelam dan Semayang terhadap situasi saat ini dan kecenderungan pada sepuluh tahun terakhir ini, memperlihatkan semakin menurunnya akses yang dimiliki masyarakat petani dan nelayan untuk mendapatkan sumberdaya alam utamanya dikarenakan penurunan kualitas dan kuantitasnya. Kegiatan manusia dalam eksploitasi sumberdaya alam seperti penangkapan ikan dengan alat ilegal, penebangan kayu rawa, pembakaran belukar, dan konversi secara terencana dari hutan dan lahan gambut merupakan akumulasi dari faktor-faktor penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya alam tersebut (Gambar 13.).

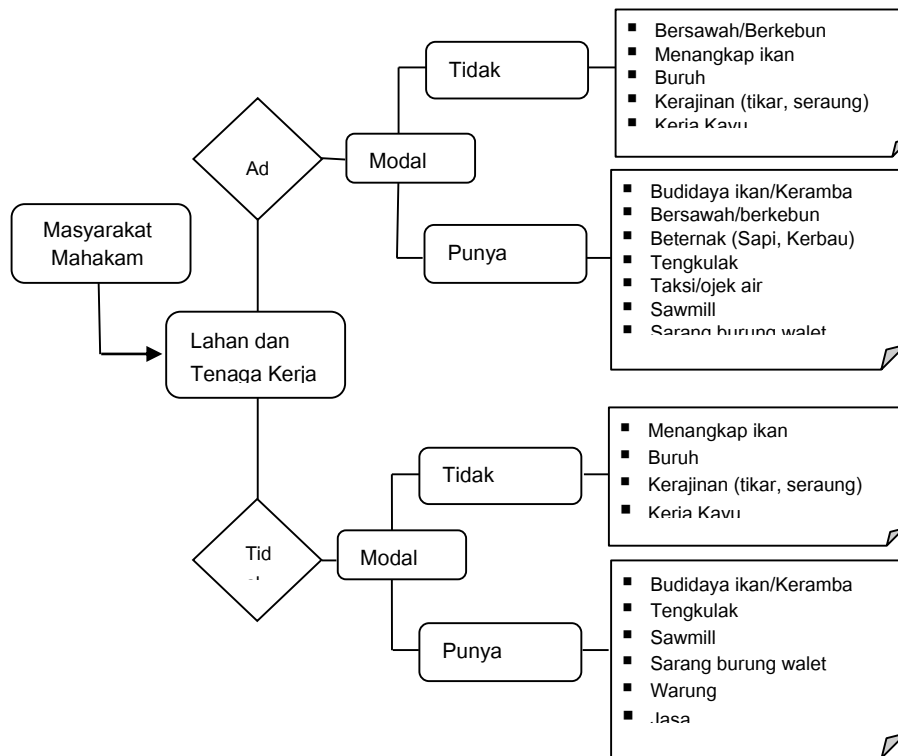
Konversi untuk perkebunan kelapa sawit merupakan kecenderungan yang paling dominan mempengaruhi keadaan di Mahakam Tengah. Kekuatan politik dan finansial dari upaya konversi dan eksploitasi sumberdaya alam di sekitar Mahakam Tengah yang destruktif tak dapat terhindar dari kendali masyarakat. Peningkatan tekanan penduduk yang terjadi terus menerus terutama dari kehadiran pendatang luar desa ikut pula menyumbang pada masalah berkurangnya akses terhadap sumberdaya alam di Mahakam Tengah. Pemukiman yang terkonsentrasi dalam perkampungan menjadi lebih padat dan berimplikasi pada limbah domestik yang menumpuk. Kepemilikan tanah dan lahan garapan untuk pertanian berkurang. Kompetisi dalam perburuan sumberdaya ikan dan penggunaan alat tangkap juga meningkat. Dengan akses yang semakin terbatas dan kompetisi yang meningkat, masyarakat cenderung meningkatkan eksploitasi secara intensif, dan oleh karenanya tidak berkelanjutan. Pada beberapa kasus penggunaan sumberdaya lain yang ada justru sering terjadi pelanggaran adat kebiasaan dan hukum dalam cara memperoleh sumberdaya tersebut. Misalnya penebangan kayu secara ilegal, penggunaan pestisida/racun dan alat setrum untuk menangkap ikan, pembakaran hutan untuk memudahkan akses mencari ikan serta penggunaan alat jerat untuk burung dan reptil. Hal ini meningkatkan rasa keputusasaan dan kemarahan yang terpendam dan meningkat yang pada akhirnya memuncak pada terjadinya konflik dalam perebutan ruang dan sumberdaya tersebut.

4.2.2. Persaingan dalam Sumber Penghidupan

Menurunnya akses terhadap sumberdaya alam meningkatkan kompetisi antar masyarakat petani dan nelayan dalam mencari sumber penghidupan di Mahakam Tengah. Di enam lokasi desa yang dikunjungi yaitu Muara Siran, Kupang Baru, Semayang, Tubuhan, Melintang dan Muara Enggelam dimana mayoritas masyarakatnya dominan dari sektor perikanan, persaingan dalam memperoleh sumber pendapatan dari perikanan diperlihatkan dengan nelayan pendatang. Penduduk migran pendatang ini umumnya dari luar desa dari Kalsel yang datang secara tidak permanen. Namun tidak sedikit pula yang menetap permanen dalam pemukiman terpisah dan pulang ke daerah asalnya di musim lebaran dan kembali lagi setelah berlebaran di kampung halaman.

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat juga memberi kontribusi pada persaingan mencari sumber penghidupan. Jumlah tanggungan keluarga dan kebutuhan yang meningkat, serta tingkat pendidikan dan ketrampilan yang homogen, memacu setiap keluarga dan individu untuk mencari sumber penghidupan yang sama dari sumber yang relatif sama. Sektor perikanan dari ketersediaan sumberdaya di hutan rawa gambut menjadi tumpuan dan gantungan ribuan kepala keluarga di Mahakam Tengah bagi penduduk lokal maupun pendatang. Menjadi nelayan tidak memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi keberanian dan ketrampilan saja.

Kompetisi juga diperlihatkan dalam penggunaan teknologi dan modifikasi alat tangkap nelayan. Penduduk migran umumnya menggunakan alat tangkap yang lebih eksploitatif dan moderen yang kurang banyak diketahui dan kuasai oleh penduduk lokal. Sementara penduduk lokal masih menggunakan alat tradisonal yang konvensional dan kurang variatif. Di beberapa desa seperti Muara Siran, penduduk lokal melakukan proteksi dan pembatasan kepada nelayan-nelayan pendatang untuk mencari ikan di tempat-tempat tertentu dan menggunakan alat-alat tertentu. Di beberapa tempat lain juga terdapat situasi yang serupa, dan hal ini seringkali juga memicu terjadi konflik dalam perebutan ruang dan kesempatan memperoleh hasil alam.



Gambar 14. Bagan Alir Pengambilan Keputusan Pemilihan Sumber Penghidupan Masyarakat Di Mahakam Tengah

4.2.3. Perubahan Iklim dan Tekanan Musiman

Masyarakat yang sumber penghidupannya tergantung dari hasil sumberdaya alam di lingkungannya, sangat terpengaruh dengan kemurahan alam dan perubahan iklim. Tingkat pendapatan dan kesuksesan dalam memperoleh hasil alam mengalami pasang surut seiring dengan perubahan iklim dan tekanan musim yang berubah-ubah. Pada musim-musim tertentu ikan sangat berlimpah dan mudah diperoleh, sementara pada musim-musim tertentu terjadi sebaliknya dimana ikan sangat sulit diperoleh. Biasanya nelayan di Mahakam Tengah mempergunakan strategi dengan diversifikasi alat tangkap sesuai dengan musim dan jenis ikan yang datang pada musim-musim tertentu.

Di musim hujan ketika terjadi banjir besar, merupakan masa-masa sulit karena arus yang deras dan alat tangkap yang mudah hanyut bahkan hilang. Ikan juga menjadi tersebar dan 'liar'. Tidak memperoleh ikan berarti mereka juga tidak memperoleh pendapatan yang berarti juga tidak bisa memperoleh kebutuhan pangan secara tunai. Sementara kesempatan memperoleh pendapatan alternatif juga sedikit dan bahkan beresiko. Biasanya kerja kayu bulat merupakan alternatif yang



Gambar 15. Pemukiman dan Rumah Penduduk yang Terendam banjir di Setiap Musim Hujan di Mahakam Tengah

dianggap paling mudah ketika banjir besar karena kayu hasil tebangan mudah transportasinya. Sementara bagi mayoritas penduduk lain yang tidak bisa bekerja di sektor pembalakan kayu, berhutang untuk bisa memperoleh kebutuhan merupakan cara yang ditempuh untuk mengatasi kesulitan tersebut. Para wanita melaporkan bahwa ketika musim banjir besar banyak dijumpai penyakit kulit dan sebaliknya ketika musim kemarau banyak dijumpai penduduk yang terkena diare dan muntaber.

Pada musim kemarau, penduduk di Mahakam Tengah mempergunakan kesempatan untuk mengolah lahan-lahan persawahan dari gambut yang mengering dengan menanam padi untuk pangan. Pada musim-musim ini kaum perempuan lebih produktif dengan bekerja di sawah untuk penanaman padi, palawija dan buah semangka. Pada tahun-tahun terakhir sebelum ternak *kerbau kalang* populasinya meningkat, siklus ini masih berjalan normal. Namun semenjak tahun 2005 ketika populasi kerbau meningkat dari perkembangbiakan dan bantuan pemerintah, kegiatan pemanfaatan lahan gambut untuk bersawah banyak ditinggalkan. Tanaman banyak yang gagal karena terinjak atau rusak dan bahkan habis oleh invasi ternak kerbau. Di sisi lain saat musim kemarau, akses sungai sebagai satu-satunya sarana mobilitas penduduk juga sulit. Akibatnya kebutuhan sembako sering terganggu dan berdampak pada naiknya harga barang di desa.

4.2.4. Kebijakan Pemerintah dan Implikasinya

Sektor perikanan dari kegiatan nelayan, seringkali kurang memperoleh kesempatan dalam investasi yang memadai dalam kebijakan pemerintah. Kurangnya sektor ini berkontribusi langsung yang terukur dalam penerimaan pendapatan daerah dianggap kurang atraktif dibandingkan investasi perkebunan yang mendatangkan investor. Ukuran-ukuran normatif penerimaan pendapatan daerah dalam statistik pemerintah lebih banyak mengacu pada angka-angka yang diperoleh dari pajak yang disetor oleh investor yang berbasis perusahaan. Sementara disisi lain perusahaan investor yang menyetor pajak tersebut sebagian besar adalah perusahaan yang berbasis lahan dengan mengkonversi lahan-lahan yang justru menjadi sumber penghidupan masyarakat lokal. Tentu saja sektor perikanan yang dianggap kurang berkontribusi langsung dalam penerimaan daerah seringkali dikalahkan kepentingannya dibandingkan investor perusahaan. Akibatnya konflik sosial banyak ditemui di beberapa lokasi desa yang mayoritas penduduknya hidup dari sektor perikanan.

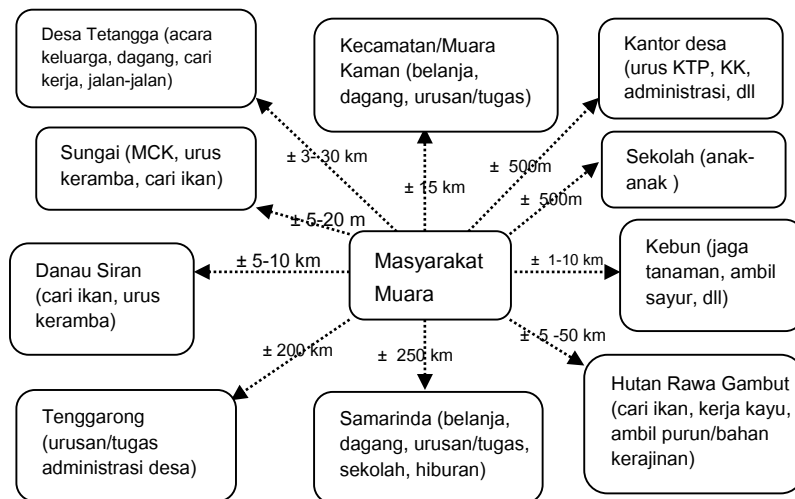
Melimpahnya dana daerah dari dana perimbangan keuangan bagi hasil migas ke kas pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, mendorong distribusi keuangan ke pemerintah desa yang porsinya juga meningkat. Desa-desa di Kukar termasuk Mahakam Tengah mengelola dana milyaran dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola oleh desa. Selain itu proyek-proyek lain yang dibiayai oleh dana APBD kabupaten juga banyak dijumpai di desa. Program-program pembangunan fisik maupun non fisik yang terjadi saat ini lebih banyak berorientasi pada tujuan hasil, dan sedikit sekali yang berbasis pada capaian proses. Akibatnya meski fasilitas dan infrastruktur memadai, secara kelembagaan dan sosial kemasyarakatan masih belum optimal. Proyek-proyek masih belum sinergi dalam program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Sebaliknya pemerintahan di tingkat desa menjadi lebih terbiasa pencapaian administratif dibandingkan implementatif. Rumor dan kecurigaan terkait dengan pengelolaan dana di desa seringkali muncul di kalangan masyarakat.

4.2.5. Teknologi dan Modernisasi

Dinamika sosial budaya masyarakat sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Masyarakat moderen lebih banyak diasumsikan dengan penggunaan teknologi yang lebih maju dalam suatu kelompok masyarakat. Di Mahakam Tengah, dengan akses yang terbatas dan pilihan sumber mata pencaharian yang juga terbatas, teknologi berkembang dari para pendatang dan pedagang yang datang ke desa-desa. Keberadaan alat-alat elektronik yang memudahkan dalam pekerjaan rumah tangga, komunikasi dan transportasi mulai berkembang di desa-desa.

Keberadaan teknologi, pada banyak kasus memudahkan dan membantu masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan rumah tangga. Namun pada banyak kasus, keberadaan dan perkembangan teknologi juga memicu eksploitasi sumberdaya alam yang lebih masif dan destruktif. Misalnya dalam teknologi penangkapan ikan, nelayan sudah menggunakan alat setrum dan daya jangkauan yang maksimal mempergunakan perahu bermesin. Demikian juga dalam kegiatan pembalakan kayu, mesin chainsaw, mesin pancang dan mesin perahu yang memiliki daya lebih besar, memudahkan para pekerja kayu untuk menebang lebih banyak dan lebih mudah.

Di kalangan kelompok wanita, menyebutkan bahwa keberadaan teknologi memberi mereka kesempatan menikmati hiburan yang lebih banyak di banding tahun-tahun sebelumnya. Keberadaan televisi, alat-alat elektronik dan handpone mengurangi waktu-waktu produktif dari kelompok wanita. Disisi lain kebutuhan dan pengeluaran juga meningkat. Meski demikian bagi sebagian besar kelompok wanita mengatakan bahwa teknologi dan modernisasi lebih banyak bermanfaat. Hal tersebut karena dengan kebutuhan dan pengeluaran yang meningkat memacu motivasi keluarga atau suami untuk lebih giat dalam mencari dan meningkatkan penghasilan. Teknologi juga memudahkan dan meningkatkan mobilitas masyarakat dari dan keluar desa untuk berbagai keperluan. Gambar 16 di bawah ini diperlihatkan contoh mobilitas penduduk setelah adanya kemajuan teknologi dan peningkatan infrastruktur di Kecamatan Muara Kaman. Sedangkan pada Gambar 17 diperlihatkan kecenderungan dan perubahan yang terjadi di Mahakam Tengah dalam beberapa dekade terdahulu dan sekarang ini.



Gambar 16. Peta Mobilitas Penduduk Mahakam Tengah di Desa Muara Siran Kecamatan Muara Kaman

Tabel 3. Bagan Kecenderungan dan Perubahan di Mahakam Tengah Kutai Kartanegara

Aspek	<1980	1980-1990	1990-2000	2001-2010	Sekarang (2011/2012)	Keterangan/Catatan
Pendapatan utama rumah tangga	💰	💰💰	💰💰💰	💰💰💰	💰	Pendapatan menibgkat pada sekitar tahun 90an ketika nelayan p0endatang belum terlalu banyak.pada tahun 2000-an pendapatn meningkat karena paska kebakaran hutan tahun 1998 banyak dijumpai danau-danau baru yang terbuka dan bisa dijangkau untuk memperoleh ikan. Pendapatn berkurang setelah hutan gambut mulai berkurang dan dikonversi untuk perkebunan.
Pekerjaan/mata pencaharian	👤👤	👤👤	👤👤👤	👤👤👤	👤👤	Pada tahun sebelum 90an, mata pencaharian hanya bersumber dari perikanan (nelayan) dan bersawah. Pada tahun 90-an mulai berkembang dari sektor jasa transportasi dan bekerja di perusahaan HTI hingga tahun 2000,an. Pada tahun-tahunterakhir pekerjaan mukai berkurang terutama dari kegiatan sawah, nelayan dan jasa karena kompetisi dengan penduduk lain
Menangkap ikan	🐟🐟🐟	🐟🐟🐟	🐟🐟🐟	🐟🐟	🐟🐟	Tahun 80-an ikan berlimpah, sementara pencariannya juga tidak sebanyak saat ini. Pada tahun-tahun terakhir ikan semakin berkurang setekah banyak hutan gambut dikonversi dan pemakaian alat tangkap yang destruktif mulai dipergunakan nelayan.
Jumlah penduduk	👤	👤👤	👤👤👤	👤👤👤	👤👤👤	<ul style="list-style-type: none"> Banyak yang menikah usia muda Rata-rata punya anak lebih dari 3 org Banyak pendatang yang datang untuk bekerja di perusahaan atau menjaga tambak
Pemilikan lahan	🏠	🏠	🏠🏠	🏠	🏠	<ul style="list-style-type: none"> Banyak lahan yang dijual karena tidak produktif terutama ke orang luar desa, Sebagian lahan diganti rugi oleh perusahaan untuk perkebunan
Keramba		🏠	🏠🏠	🏠🏠🏠	🏠🏠🏠	<ul style="list-style-type: none"> keramba mulai dikenal dan dikembangkan pada tahun 1990an, pada tahun 1980-an keramba belum dikembangkan secara komersial, hanya untuk penyimpanan ikan tangkapan kegiatan keramba menjadi alternatif setelah ikan dari tangkapan alan semakin berkurang, namun kualitas air yang berubah-ubah dan biaya/mogdal yang tinggi menyebabkan tidak semua penduduk menggeluti profesi ini
Kriminalitas dan perjudian		☠️	☠️☠️	☠️☠️☠️	☠️☠️☠️	Peredaaran uang dikampung semakin meningkat setelah harga ikan meningkat dan proyek-proyek pemerintah banyak dilakukan di desa. Akses keluar desa yang terbatas, imbasnya pada meningkatnya kriminalitas, perjudian, narkoba dan miras pada tahun-tahun terakhir
Pemakaian alat tangkap ikan	🔄	🔄	🔄🔄	🔄🔄	🔄🔄🔄	Penggunaan alat tangkap semakin berkembang dan variatif termasuk alat-alat tangkap yang destruktif seperti potas, setrum dan jaring trawl mini
Kerja kayu			🪚	🪚🪚	🪚🪚	Pekerjaan menebang kayu secara komersial meningkat setelah adanya pembeli dari kayu-kayu rawa gambut. Puncaknya pada tahun 2000-2005 ketika pabrik MDF Sebulu membeli kayu-kayu hasil penebangan masyarakat.
Pendidikan	📖	📖📖	📖📖	📖📖📖	📖📖📖	Pendidikan berkembang setelah adanya program pemerintah untuk pembangunan fasilitas dan pemberian beasiswa sekolah gratis hingga SMU.
Tengkulak	👤	👤👤	👤👤👤	👤👤👤	👤👤👤	Tengkulak pembeli ikan meningkat pada tahun 2000an ketika hasil produksi ikan berlimpah. Saat ini tengkulak pembeli ikan berkurang seiring dengan penurunan produksi ikan alam dari Mahakam Tengah
Bersawah	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	Mulai berkurang karena peningkatan hama babi, tikus, dan kerbau yang merusak tanaman. Tenaga kerja juga berkurang karena bekerja di luar desa atau perusahaan
Banjir		☔	☔☔	☔☔☔	☔☔☔☔	Secara perodik banjir dengan intensitas yang besar meningkat semenjak tahun 2000an
Hama	🐷	🐷🐷	🐷🐷🐷	🐷🐷🐷	🐷🐷🐷	Hama babi dan tikus mulai merusak tanaman ladang dan sawah pada tahun-tahun terakhir
Penyakit	👤	👤	👤	👤👤	👤👤👤	Banyak dijumpai penduduk yang sakit dengan jenis penyakit baru yang sebelumnya tidak ada dan diketahui masyarakat pada tahun-tahun terakhir.

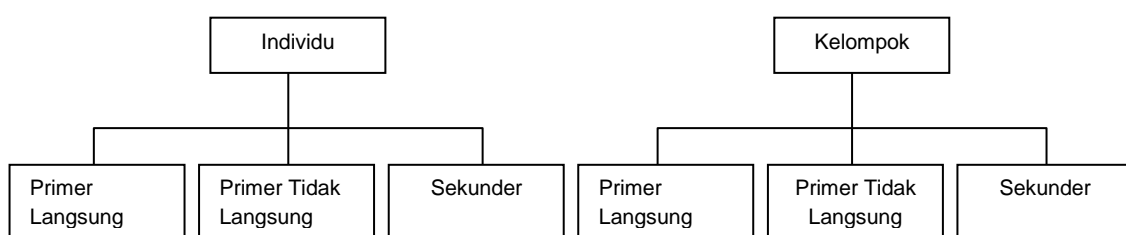
BAGIAN 5

PIHAK-PIHAK TERLIBAT DAN BERKEPENTINGAN

Pengelolaan sumberdaya alam dari hutan rawa gambut di Mahakam Tengah ke depan secara kolaboratif membawa konsekuensi adanya pembagian otoritas dan tanggung jawab berdasarkan kepentingan diantara para pihak (*stakeholders*). Apabila proyek untuk model konservasi rawa gambut ini dijalankan dan REDD+ diimplementasikan, maka suatu proses dan mekanisme kelembagaan dalam pengelolaan kawasan gambut di Mahakam Tengah mutlak diperlukan. Kelembagaan yang ada idealnya adalah yang bersifat multistakeholders, dan untuk hal tersebut identifikasi para pihak (*stakeholders*) yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan keberadaan dan kegiatan konservasi kawasan gambut di Mahakam Tengah perlu dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisa stakeholder berkepentingan, pihak-pihak terlibat sebagai stakeholder kunci di Mahakam Tengah dapat dibedakan atas *stakeholders* individu yaitu orang perorang yang berasal dari masyarakat desa sekitar atau dari luar desa, dan *stakeholders* kelompok (*group*) baik berupa lembaga, organisasi atau instansi yang berasal dari dalam atau dari luar desa. Masing-masing *stakeholders* (individu dan kelompok) diklasifikasikan berdasarkan keterlibatan dalam isu pengelolaan kedepan yaitu menjadi tiga kelompok yakni: (1). Primer langsung; (2). Primer tidak langsung; dan (3). Sekunder; (Lihat Gambar 21.)

Kelompok primer langsung adalah *stakeholders* yang terlibat langsung dalam pengelolaan kawasan konservasi gambut Mahakam Tengah dan atau memperoleh dampak langsung dari pengelolaan di masa mendatang kelak. Kelompok primer tidak langsung merupakan *stakeholders* yang terlibat secara tidak langsung dalam pengelolaan kawasan konservasi gambut Mahakam Tengah, tetapi memperoleh manfaat langsung dari kegiatan konservasi yang kelak dilakukan. Sedangkan kelompok sekunder adalah *stakeholders* yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan kawasan konservasi gambut Mahakam Tengah dan tidak memperoleh manfaat secara langsung dari pengelolaan kawasan konservasi gambut Mahakam Tengah.



Gambar 17. Skema Klasifikasi *stakeholders* Individu dan kelompok

5.1. IDENTIFIKASI *STAKEHOLDER* INDIVIDU

Berikut adalah *stakeholder* Individu yang berhasil teridentifikasi berdasarkan kepentingan utamanya terhadap kawasan konservasi gambut Mahakam Tengah, dapat dirinci sebagai berikut:

a. *Stakeholder* Individu Primer Langsung.

- (1) **Bupati**; sebagai kepala Pemerintah Daerah, Bupati memiliki kepentingan terhadap pengelolaan kawasan konservasi gambut Mahakam Tengah, oleh karena menyangkut kebijakan wilayah administrasi dan pembangunan Daerah.
- (2) **Asisten 2**; sebagai unsur pemerintahan langsung di bawah Bupati yang membidangi urusan ekonomi, pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam;
- (3) **Camat**; Khususnya di kecamatan yang wilayahnya berkaitan langsung dengan rencana konservasi gambut Mahakam Tengah, seorang camat berkepentingan secara administratif dalam fasilitasi dan pembinaan yang kelak dilakukan dalam kegiatan kawasan konservasi gambut Mahakam Tengah;
- (4) **Kepala Desa**; Sebagai pucuk pimpinan tertinggi sekaligus wakil Pemerintah di tingkat desa, Kepala Desa berkepentingan terhadap manfaat langsung dari kawasan kawasan konservasi gambut Mahakam Tengah untuk kemakmuran warga desanya.

b. Stakeholder Individu Primer Tidak Langsung

- (1) **Tokoh Agama**; Sebagai pemuka agama di desa, seorang tokoh agama berkepentingan terhadap sikap dan perilaku masyarakat desa yang mendukung kelestarian kawasan konservasi gambut Mahakam Tengah;
- (2) **Guru**; Sebagai pendidik dan pengajar, guru berperan penting dalam memberikan pendidikan dan pengajaran terhadap sikap dan perilaku murid sebagai generasi muda yang mendukung kelestarian kawasan konservasi gambut Mahakam Tengah.

c. Stakeholder Individu Sekunder

Untuk *stakeholder* individu sekunder dalam kegiatan ini yang teridentifikasi utama adalah pekerja di perusahaan perkebunan kelapa asawit dan pertambangan. Mereka berperan penting dalam memberikan input terhadap kebijakan perusahaan untuk mendukung kelestarian fungsi dan manfaat konservasi gambut Mahakam Tengah. Rincian identifikasi *stakeholder* individu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Identifikasi Stakeholder Individu Berdasarkan Kepentingan Utama:

No	Stakeholder Individu	Kepentingan Utama
1.	Primer Langsung	
	Bupati	Pengelolaan wilayah Administrasi
	Camat	Pembinaan warga dusun
	Kepala Desa	Manfaat langsung bagi warga desa
2.	Primer tidak langsung	
	Tokoh Agama	Sikap dan perilaku warga
	Guru	Pendidikan bagi murid sekolah
3.	Sekunder	-
	Pekerja perusahaan	Dukungan dan fasilitasi

5.2. IDENTIFIKASI STAKEHOLDER KELOMPOK/LEMBAGA/INSTANSI

Dalam studi kasus di kawasan konservasi gambut Mahakam Tengah, *stakeholder* kelompok yang berhasil teridentifikasi dapat dirinci sebagai berikut:

a. Stakeholder Kelompok/ Lembaga/Instansi Primer Langsung

- (1) **Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kutai Kartanegara**; Secara konstitusi Dinas Kehutanan di kabupaten, tidak memiliki otoritas dalam pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan non

kehutanan di daerah, namun secara administrasi wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian kawasan Konservasi gambut Mahakam Tengah dalam konteks pembangunan daerah. Maka kepentingan utama Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah menyangkut pengembangan sumberdaya dan jasa lingkungan;

- (2) **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;** Secara langsung lembaga ini berkewenangan dalam memberikan arahan perencanaan dalam pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Kukar;
- (3) **Badan Lingkungan Hidup Daerah;** Berkepentingan dalam melakukan evaluasi dan monitoring pengelolaan lingkungan hidup di daerah khususnya dalam Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) perusahaan di sekitar Mahakam Tengah. Kepentingan paling nyata adalah memastikan bahwa Amdal perusahaan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah daya dukung lingkungan;
- (4) **Badan Pertanahan di Tingkat daerah;** Berperan penting dalam pengalokasian dan pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan investasi yang berbasis lahan. Pertimbangan pemilihan legalitas kawasan yang sesuai dengan peruntukan dan pembangunan daerah serta daya dukung lingkungan sangat berkaitan dengan kewenangan institusi;
- (5) **Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara;** Sesuai tugas pokok Dinas Pariwisata, memiliki kepentingan pengembangan pengelolaan kawasan konservasi gambut untuk tujuan wisata dan jasa lingkungan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai perencana program dan evaluasi, promosi dan informasi potensi, pelaksana bina wisata alam dan melakukan kerjasama pengembangan konservasi dan jasa lingkungan.
- (6) **Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara;** Sesuai tugas pokok Dinas Pertanian dan Perikanan berperan dalam kelestarian fungsi dan manfaat kawasan reservat untuk perikanan. Selain itu berperan penting dalam pemberdayaan nelayan dan peningkatan sektor perikanan di Mahakam Tengah;
- (7) **Kelompok petani nelayan sungai dan keramba;** Merupakan pengguna dan pemanfaat langsung dari keberadaan dan kelestarian kawasan konservasi gambut. Kesejahteraan mereka bisa menjadi indikator keberdayaan masyarakat dan kelestarian sumberdaya alam di Mahakam Tengah;
- (8) **Kelompok Petani Pengelola air tiga danau;** Kelompok ini berkepentingan terhadap kelestarian dan pemanfaatan yang berkaitan langsung dengan hutan rawa gambut di Mahakam Tengah.
- (9) **Kelompok Pemungut hasil Hutan kayu ataupun non kayu** (log, kayu bakar, rotan, daun tikar dan serauk, ikan sungai); Kelompok ini walaupun jumlahnya tidak banyak, namun berperan penting dalam pengelolaan kawasan gambut di masa mendatang karena mereka adalah pemanfaat langsung.
- (10) **Pemerintah Desa di masing-masing lokasi kegiatan;** Keterlibatan Pemerintah Desa secara langsung dalam pengelolaan Konservasi gambut Mahakam Tengah adalah sebagai mitra dan 'jembatan' komunikasi dengan Pemda Kutai Kartanegara. Selain melakukan pengelolaan langsung, kelak Pemerintah Desa juga melakukan kegiatan-kegiatan langsung berupa pengamanan, perlindungan dan pelestarian bekerjasama dengan satuan aparat dan lembaga lain di tingkat desa yang ada.

b. Stakeholder Kelompok/ Lembaga/Instansi Primer Tidak Langsung

- (1) **Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;** Berkepentingan dalam detil penataan ruang di tingkat kabupaten dan pembangunan infrastruktur;

- (2) **Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;** Berkepentingan dalam kaitan jangka panjang pengembangan kawasan konservasi gambut Mahakam Tengah untuk REDD+ maupun investasi pengembangan jasa lingkungan lainnya;
- (3) **Dinas Pertambangan Kutai Kartanegara;** Dinas Pertambangan sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa lokasi Konservasi gambut Mahakam Tengah dan sekitarnya ayang kelak akan ditetapkan sebagai kawasan perlindungan harus dapat dipastikan lepas dari konsesi tambang;
- (4) **Universitas Kutai Kartanegara;** Sesuai misi Perguruan Tinggi, Universitas Kutai Kartanegara berkepentingan melakukan penelitian dan pengembangan di dalam kawasan konservasi lahan gambut. Bilamana memungkinkan lahan basah bisa menjadi pola pokok ilmiah mereka;
- (5) **Lembaga sawadaya masyarakat,** Berkepentingan dalam kegiatan fasilitasi, advokasi dan upaya lain berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan kawasan gambut Mahakam Tengah. Lembaga-lembaga tersebut antara lain RASI, Bioma, Bebsic, WWF.

c. Stakeholder Kelompok/ Lembaga/Instansi Sekunder

- (1) **Perusahaan (Perkebunan dan Tambang Batubara);** Walaupun lokasi Konservasi gambut Mahakam Tengah tidak termasuk dalam konsesi tambang ataupun HGU kebun sawit, tetapi dalam pengelolaannya di masa depan sangat dibutuhkan kolaborasi terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan kontribusi perusahaan dalam mendukung konservasi dan program-program 'hijau';
- (2) **Pers/Wartawan;** Dengan adanya konflik sumberdaya, model pengelolaan kawasan, serta keberadaan model konservasi di kawasan non kehutanan, menjadi topik menarik dalam pemberitaan media, baik cetak maupun elektronik, mulai dari tingkat lokal, Nasional bahkan Internasional;
- (3) **Pengembang traveling dan wisata alam;** Dapat terlibat langsung terhadap pengelolaan Konservasi gambut Mahakam Tengah karena kepentingannya pada pelestarian ekosistem, budaya dan nilai-nilai positif di Mahakam tengah. Pengembangan jasa lingkungan untuk ekowisata di lokasi Konservasi gambut Mahakam Tengah dapat didukung oleh eksistensi nilai-nilai budaya yang berkembang dari komunitas sekitar, sehingga pengembangan ekowisata dapat terintegrasi dan berdampak positif bagi masyarakat sekitar;
- (4) **DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;** Dalam banyak hal DPRD berkepentingan melakukan kontrol dan suport terhadap Pemerintah Daerah, terkait kebijakan penganggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi;
- (5) **Aparat keamanan Polres Kutai Kartanegara;** Aparat keamanan Polres Kutai Kartanegara dapat berperan terhadap penyelesaian konflik lahan yang sering terjadi di masyarakat. Konflik berpotensi negatif terhadap pengelolaan kawasan. Klaim penggunaan lahan yang meningkat seiring dengan keberadaan konsesi perkebunan dan pertambangan dikhawatirkan dapat terjadi pula di dalam kawasan yang diinisiasi untuk model konservasi dan proyek REDD+ ini;
- (6) **Perusda Kukar;** Berperan dalam pengembangan usaha dan jasa sebagai kelembagaan yang kelak berperan sebagai *project proponen* atau unit manajemen pengelola.



Gambar 18.

Basecamp salah satu Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit Di Sungai Kedang Kepala, salah satu stakeholder investor yang memiliki kepentingan di wilayah Mahakam Tengah

Para pihak yang teridentifikasi berdasarkan kepentingan utama yang berkaitan dengan Konservasi gambut Mahakam Tengah ini akan dibedakan lagi berdasarkan kepentingan keterlibatan (*interest*) dan pengaruhnya (*influence*) terhadap pengelolaan kawasan konservasi gambut Mahakam Tengah. Seperti yang terinci pada tabel berikut:

Tabel 5. Pemetaan Stakeholder Kelompok/Individu Berdasarkan Kepentingan Keterlibatan dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi Gambut Mahakam Tengah

		INTEREST/KEPENTINGAN	
		TINGGI	RENDAH
P E N G A R U H	T I N G G I	<ul style="list-style-type: none"> • Bupati (PEMDA) • Asisten 2 • Dinas Perkebunan dan Kehutanan • Badan Pertanahan • DPRD Kutai Kartanegara • Perusahaan perkebunan dan tambang • Pemerintahan Desa • 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata • Tokoh Masyarakat • Guru • Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) • Aparat Keamanan Polres Kutai Kartanegara • Pers/Wartawan
	R E N D A H	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian Kutai Kartanegara • BKPM • Perusda • Kelompok petani nelayan • Kelompok Pemungut hasil Hutan kayu ataupun non kayu 	<ul style="list-style-type: none"> • Pem. Kecamatan • Pekerja perusahaan (Tambang dan kebun sawit) • Paguyuban Etnis Lokal • Murid Sekolah dan Mahasiswa

Tabel di atas adalah skema pemetaan stakeholder berdasarkan tingkat kepentingan (*interest*) dan keterlibatan, serta pengaruhnya (*influence*) terhadap pengelolaan kawasan konservasi gambut Mahakam Tengah. Pada Tabel di atas terdapat empat (empat) varian *stakeholder* dengan (1) tingkat kepentingan dan keterlibatan serta pengaruh yang sama-sama tinggi, (2) *stakeholder* dengan kepentingan dan keterlibatan yang tinggi dengan pengaruh yang rendah, (3) *stakeholder* dengan kepentingan dan keterlibatan yang rendah, namun memiliki pengaruh (kewenangan) yang tinggi, serta (4) *stakeholder* dengan tingkat interest/kepentingan maupun pengaruhnya yang juga rendah.



Gambar 19. Kelompok Perempuan sebagai salah satu stakeholders penting yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan di wilayah Mahakam Tengah



CLINTON
CLIMATE
INITIATIVE



William J. Clinton Foundation
383 Dorchester Avenue, Suite 400
Boston, MA 02127

Yayasan Biosfer Manusia (BIOMA)
Jl. AW Syahrani – Perum Ratindo Griya Permai Blok F.7-8, Samarinda 75124
Kalimantan Timur. Telp./Fax.: +62-541-739864,
e-mail: biosfer.manusia@gmail.com

Kabupaten Kutai Kartanegara
Jl. .Walter Monginsidi, Tenggarong – Kalimantan Timur
Telp.(0541) 661085, 662066
Fax. (0541) 662056
Website : <http://www.kutaikartanegarakab.go.id/>